



TAHUN
2023

RENCANA KERJA

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENSIARAN
(BAPPEDALITBANG)

Kabupaten Tegay



PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI TEGAL
NOMOR : 050 / 1601 TAHUN 2021

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 DAN
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN TEGAL

BUPATI TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa guna kelancaran dalam penyusunan Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tegal, perlu dibentuk Tim Penyusun;
 - b. bahwa mereka yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tegal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tegal.

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - eUndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022;
16. Peraturan Bupati Tegal Nomor 80 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tegal;
17. Peraturan Bupati Tegal Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal
18. Peraturan Bupati Tegal Nomor 86 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022;
19. Keputusan Bupati Tegal Nomor 900/1184 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun 2022;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022;

21. Peraturan Bupati Tegal Nomor 86 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tegal sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Penyusun sebagaimana dimaksud Diktum KESATU meliputi :
- a. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan dan rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tegal Tahun 2023;
 - b. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tegal Tahun 2022; dan
 - c. penyelarasan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
- KETIGA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Tegal.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Slawi

pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI TEGAL,


UMI AZIZAH

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI TEGAL

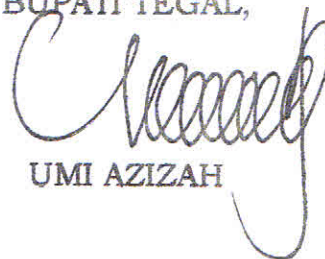
NOMOR : 050/1601 TAHUN 2022

TANGGAL : 31 Desember 2022

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 DAN
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN TEGAL

No.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Bappedalitbang Kabupaten Tegal	Ketua
2.	Sekretaris Bappedalitbang Kabupaten Tegal	Wakil Ketua
3.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Program pada Bappedalitbang Kabupaten Tegal	Anggota
4.	Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Bappedalitbang Kabupaten Tegal	Anggota
5.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Bappedalitbang Kabupaten Tegal	Anggota
6.	Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Bappedalitbang Kabupaten Tegal	Anggota
7.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Bappedalitbang Kabupaten Tegal	Anggota

BUPATI TEGAL,



UMI AZIZAH

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Yang Maha Esa, karena atas berkah dan rahmat-Nya Rencana Kerja (Renja) Bappedalitbang Kabupaten Tegal Tahun 2023 dapat disusun.

Renja Bappedalitbang Kabupaten Tegal Tahun 2023 ini disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tegal Tahun 2023, untuk menjalankan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dokumen ini memuat rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Bappedalitbang Kabupaten Tegal dengan disertai indikator kinerja, target kinerja dan pagu indikatif. Renja ini selanjutnya akan menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) sebelum disahkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bappedalitbang Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2023.

Kami menyadari bahwa Renja ini belum sempurna, oleh karena itu kami mohon masukan dan koreksi dari semua pihak. Semoga di tahun yang akan datang kinerja Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal dapat ditingkatkan dalam memberikan pelayanan perencanaan dan kelitbang bagi perangkat daerah maupun masyarakat dalam mendukung pencapaian pembangunan di Kabupaten Tegal.

Kepala Bappedalitbang Kabupaten Tegal,

M. FARIED WAJDY, S.Sos, M.Si

Pembina Tk I

NIP.19730801 199803 1 003

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	iv
SK Renja	v
BAB I. PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Landasan Hukum	I-3
1.3. Maksud dan Tujuan	I-5
1.4. Sistematika Penulisan	I-5
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU	II-1
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappedalitbang Tahun Lalu dan Capaian Renstra Bappedalitbang	II-1
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Bappedalitbang Kab. Tegal.....	II-17
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Bappedalitbang KabupatenTegal.....	II-21
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	II-24
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	II-48
BAB III TUJUAN DAN SASARAN RENJA BAPPEDALITBANG.....	III-1
3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional	III-1
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Bappedalitbang	III-6
3.3. Program dan Kegiatan.....	III-8
3.4. Strategi Pengarusutamaan dalam Pembangunan	III-13
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN.....	IV-1
BAB VII PENUTUP	VII-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Bappedalitbang dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 Kabupaten Tegal.....	II-2
Tabel 2. 2	Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Bappedalitbang Kabupaten Tegal.....	II-19
Tabel 2. 3	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Kabupaten Tegal.....	II-25
Tabel 2. 4	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023 Bappedalitbang Kabupaten Tegal.....	II-49
Tabel 3. 1	Tujuan dan Sasaran Bappedalitbang Tahun 2023-2024.....	III-7
Tabel 4.1	Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 Kabupaten Tegal.....	IV-2

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, diamanatkan bahwa Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja.

Rancangan Akhir Renja merupakan tahapan ketiga dalam penyusunan Renja secara keseluruhan yang terdiri dari Rancangan Awal, Rancangan, Rancangan Akhir, dan Penetapan Renja. Penyusunan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 merupakan proses penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah. Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah merupakan penyempurnaan dari hasil forum perangkat daerah.

Penyusunan rancangan akhir Renja Bappedalitbang Tahun 2023 berpedoman pada Perubahan Renstra Bappedalitbang Tahun 2019-2024, dimana tahun 2023 merupakan pelaksanaan tahun ke

tiga dalam periode Perubahan Renstra Bappedalitbang Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024.

Adapun Renja sendiri adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang berjangka waktu 1 (satu) Tahun yang bertujuan untuk merencanakan pembangunan tahunan Perangkat Daerah, memuat program, kegiatan dan sub kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.

Renja menterjemahkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan sedemikian rupa sehingga berkontribusi kepada pencapaian program RKPD secara keseluruhan dan tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal, Bappedalitbang merupakan perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, sesuai dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 31 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan-Badan Daerah Kabupaten Tegal, Bappedalitbang memiliki kewenangan untuk melaksanakan perencanaan pembangunan daerah, pengendalian dan evaluasi hasil rencana pembangunan daerah, melaksanakan rencana, pelaksanaan dan evaluasi kelitbang, perumusan kebijakan dan pemanfaatan pengelolaan data dan informasi perencanaan, serta menyelenggarakan kesekretariatan/ ketatausahaan Badan.

Sebagai perangkat daerah yang bertugas melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan, Bappedalitbang menitikberatkan pelayanan Perangkat Daerah pada peningkatan keterpaduan data/informasi, keterlibatan partisipasi masyarakat dan para pemangku

kepentingan dalam proses perencanaan pembangunan sehingga dapat disusun perencanaan yang terpadu, sinergis dan terintegrasi untuk periode 1 (satu) tahun ke depan yakni tahun 2023.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tegal 2009-2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah Kabupaten Tegal;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 110), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 110);
15. Peraturan Bupati Tegal Nomor 31 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan-Badan Daerah Kabupaten Tegal.

16. Peraturan Bupati Tegal Nomor 57 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2023.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Rancangan Akhir Renja Bappedalitbang Tahun 2023 adalah melaksanakan proses penyusunan Renja berdasarkan data dan informasi wilayah Kabupaten Tegal dengan melibatkan para pemangku kepentingan agar diperoleh dokumen perencanaan yang aspiratif dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan tugas dan fungsi Bappedalitbang. Rancangan Akhir Renja Bappedalitbang merupakan tolak ukur penilaian kinerja Bappedalitbang pada tahun 2023.

Adapun tujuan penyusunan Rancangan Akhir Renja ini adalah:

1. Untuk menjabarkan Perubahan Renstra Bappedalitbang Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 dan pedoman kerja Bappedalitbang Kabupaten Tegal Tahun 2023;
2. Untuk memberikan gambaran program/kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan di lingkungan Bappedalitbang Kabupaten Tegal tahun 2023;
3. Untuk memberikan gambaran tentang target kinerja yang akan dicapai tahun 2023.

1.4. Sistematika Penulisan

Rancangan Akhir Renja Bappedalitbang Kabupaten Tegal Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai-berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum tentang penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

**BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN LALU**

Menguraikan tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan capaian Renstra SKPD, analisa kinerja pelayanan Perangkat Daerah, isu-isu penting tentang tugas dan fungsi SKPD, serta review terhadap rancangan awal RKPD dan penelaahan usulan program dan kegiatan para pemangku kepentingan tahun 2023.

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN BAPPEDALITBANG

Terdiri dari telaah terhadap kebijakan nasional dan provinsi, tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah serta program dan kegiatan.

**BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT
DAERAH**

Terdiri dari rencana kegiatan dan Program serta target untuk Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2023

BAB V : PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappedalitbang Tahun Lalu dan Capaian Renstra Bappedalitbang

Kualitas Renja perangkat daerah yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam menyusun Renja yang berkualitas diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra perangkat daerah.

Untuk mengetahui pencapaian target yang telah ditetapkan dalam Perubahan Renstra Bappedalitbang Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024, perlu dilakukan evaluasi kinerja yaitu dengan membandingkan antara target yang telah ditetapkan dalam Perubahan Renstra dengan capaian realisasinya. Perbandingan antara target dan capaian realisasi ini akan digunakan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang harus dilakukan untuk perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Dalam penyusunan Renja Bappedalitbang Kabupaten Tegal Tahun 2023 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renja Bappeda Bappedalitbang Kabupaten Tegal Tahun 2021. Juga disajikan perkiraan capaian target Renstra Bappedalitbang Kabupaten Tegal sampai dengan tahun 2022, yang sudah menggunakan Perubahan Renstra Bappeda Bappedalitbang Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024.

Pada tahun 2021 Bappedalitbang Kabupaten Tegal melaksanakan 4 program, 14 kegiatan dan 34 sub kegiatan. Secara rinci evaluasi terhadap hasil pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut tersaji dalam Tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021
Dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Bappedalitbang Kabupaten Tegal

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (n-1) (2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7 = (6/5)	8	9 = (8)	10 = (8/4)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH								
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan layanan umum kepegawaian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase pemenuhan layanan perencanaan dan keuangan	100%	100%	1007%	100%	100%	1007%	100%
	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Tersusunnya dokumen perencanaan</i>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen Renja ; RKA	1 dok	1 dok	1 dok	100%	1 dok	1 dok	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	SPIP ; LKJIP dan Pameran Pembangunan	3 dok; 2 kl	3 dok; 2 kl	3 dok	100%	3 dok; 2 kl	3 dok	100%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Kebutuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan	12 bulan	12 bln	100%	12 bulan	12 bln	100%

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (n-1) (2021))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7 = (6/5)	8	9 = (8)	10 = (8/4)
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Laporan Administrasi Keuangan	5 dok	5 dok	5 dok	100%	5 dok	5 dok	100%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Kebutuhan Adm. Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Kebutuhan Adm. Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5 item	5 item	5 item	100%	5 item	5 item	100%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat Tulis kantor, bahan pembersih	32 item; 23 item	32 item; 23 item	32 item; 23 item	100%	32 item; 23 item	32 item; 23 item	100%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah surat terkirim, rekening air, listrik dan telpon,	1 thn	1 thn	1 thn	100%	1 thn	1 thn	100%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Cetak dan Penggandaan,	5 item	5 item	5 item	100%	5 item	5 item	100%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Surat kabar/majalah, peraturan perundang-undangan	12 bulan	12 bulan	12 bln	100%	12 bulan	12 bln	100%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi	12 bulan	12 bulan	12 bln	100%	12 bulan	12 bln	100%

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (n-1) (2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7 = (6/5)	8	9 = (8)	10 = (8/4)
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Belanja Modal)	Jumlah Komputer PC	1 unit	1 unit	1 unit	100%	1 unit	1 unit	100%
		Jumlah Printer	1 unit	1 unit	1 unit	100%	1 unit	1 unit	100%
		Jumlah Mesin penghancur kertas	1 unit	1 unit	1 unit	100%	1 unit	1 unit	100%
		Jumlah Kursi rapat	10 buah	10 buah	10 buah	100%	10 buah	10 buah	100%
		Jumlah meja rapat	5 buah	5 buah	5 buah	100%	5 buah	5 buah	100%
		Jumlah kursi roda	1 unit	1 unit	1 unit	100%	1 unit	1 unit	100%
		Jumlah Dispenser	6 unit	6 unit	6 unit	100%	6 unit	6 unit	100%
		Jumlah rak meja	6 unit	6 unit	6 unit	100%	6 unit	6 unit	100%
		Jumlah karpet	150m2	150m2	150m2	100%	150m2	150m2	100%
		LCD	4 unit	4 unit	4 unit	100%	4 unit	4 unit	100%
		Camera, USB video, kabel RCA, cabel HDMI	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	1 paket	100%
		Kabel jaringan jenset dan tangki bbm	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	1 paket	100%
		Jumlah wireless mix	1 unit	1 unit	1 unit	100%	1 unit	1 unit	100%
		Jumlah Podium	1 unit	1 unit	1 unit	100%	1 unit	1 unit	100%

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (n-1) (2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7 = (6/5)	8	9 = (8)	10 = (8/4)
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan	100%	100%	75,70%	75,70%	100%	75,70%	75,70%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	<i>Jumlah peranko dan materai</i>	350 buah	350 buah	265 buah	75,70%	350 buah	265 buah	75,70%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	<i>Jumlah komunikasi, air dan listrik yang terpenuhi</i>	12 bulan	12 bulan	12 bln	100%	12 bulan	12 bln	100%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan	1 tahun	1 tahun	1 tahun	100%	1 tahun	1 tahun	100%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	<i>servis kendaraan</i>	<i>12 bulan</i>	<i>12 bulan</i>	12 bulan	1000%	<i>12 bulan</i>	12 bulan	1000%
		<i>suku cadang</i>	6 item	6 item	6 item	100%	6 item	6 item	100%
		<i>BBM</i>	12.614 liter	12.614 liter	5.220 liter	42%	12.614 liter	5.220 liter	42%
		<i>STNK</i>	<i>12 bulan</i>	<i>12 bulan</i>	12 bln	100%	<i>12 bulan</i>	12 bln	100%
	Pemeliharaan Mebel	<i>Jumlah pemeliharaan mebeleur</i>	3.571 m2	3.571 m2	3.571 m2	100%	3.571 m2	3.571 m2	100%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<i>Terlaksananya Pemeliharaan AC, CCTV, LCD, sound system, Printer, komputr /laptop</i>	101 buah	101 buah	50 buah	50%	101 buah	50 buah	50%

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (n-1) (2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7 = (6/5)	8	9 = (8)	10 = (8/4)
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	<i>Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor</i>	12 bulan	12 bulan	12 bln	100%	12 bulan	12 bln	100%
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN dan EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Dokumen Perencanaan disusun sesuai tahapan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase keselarasan kebijakan penganggaran antara prioritas kabupaten, provinsi dan nasional.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Tingkat Kesesuaian rencana dan realisasi kegiatan	87%	87%	86%	98,85%	87%	86%	98,85%
		Tingkat capaian indikator sesuai target	86%	86%	85%	99%	86%	85%	99%
	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Meningkatnya persentase dokumen perencanaan disusun sesuai regulasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Rakor DAK, Banprov, DBHCJT, system SIPD	8 rakor; 1 system	8 rakor; 1 system	8 rakor; 1 system	100%	8 rakor; 1 system	8 rakor; 1 system	100%
	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	<i>Buku RKPD ; RKPD Perubahan; Perubahan RPJMD; RPJMD Teknokratik; RPJPD</i>	1 dok; 1 dok, 1 dok	1 dok; 1 dok, 1 dok	1 dok; 1 dok, 1 dok	100%	1 dok; 1 dok, 1 dok	1 dok; 1 dok, 1 dok	100%

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (n-1) (2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7 = (6/5)	8	9 = (8)	10 = (8/4)
	<i>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</i>	<i>Meningkatnya kesesuaian rencana dan realisasi fisik dan keuangan kegiatan pembangunan</i>	48 OPD	48 OPD	48 OPD	80%	48 OPD	48 OPD	80%
		<i>Meningkatnya ketercapaian indikator pembangunan sesuai target</i>	48 OPD	48 OPD	48 OPD	70%	48 OPD	48 OPD	70%
	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	<i>Rakor TEpra ; Dok LKPJ ; Dok. Evaluasi RRPD</i>	<i>4 Rakor ; 12 Raker ; 1 dok LKPJ ; 2 dok Evaluasi</i>	<i>4 Rakor ; 12 Raker ; 1 dok LKPJ ; 2 dok Evaluasi</i>	<i>3 Rakor ; 12 Raker ; 1 dok LKPJ ; 2 dok evaluasi</i>	100%	<i>4 Rakor ; 12 Raker ; 1 dok LKPJ ; 2 dok Evaluasi</i>	<i>3 Rakor ; 12 Raker ; 1 dok LKPJ ; 2 dok evaluasi</i>	100%
	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	<i>Rakor POK ; Monitoring kegiatan strategis ;</i>	<i>4 rakor POK ; 4 Raker Pokja ; 12 lap.bul ; 16 Monitoring ;</i>	<i>4 rakor POK ; 4 Raker Pokja ; 12 lap.bul ; 16 Monitoring ;</i>	<i>3 rakor POK ; 1 Raker Pokja ; 6 Lap bul ; -</i>	50%	<i>4 rakor POK ; 4 Raker Pokja ; 12 lap.bul ; 16 Monitoring ;</i>	<i>3 rakor POK ; 1 Raker Pokja ; 6 Lap bul ; -</i>	50%
	PROGRAM KOORDINASI dan SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Daerah Rumpun Pemkesos	97%	97%	86%	88,66%	97%	86%	88,66%
		Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Daerah Rumpun perekonomian dan pengembangan infrastruktur	99,17%	99,17%	95,50%	98,45%	99,17%	95,50%	98,45%

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (n-1) (2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7 = (6/5)	8	9 = (8)	10 = (8/4)
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Keselarasn dokumen perencanaan rumpun pemerintahan	30 OPD	30 OPD	30 OPD	100%	30 OPD	30 OPD	100%
		Meningkatnya keselarasn dokumen perencanaan rumpun kesejahteraan sosial	8 OPD	8 OPD	8 OPD	100%	8 OPD	8 OPD	100%
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan Bidang Pemerintahan ; dok perencanaan sektoral bidang pemerintahan	1 lap; 1 lap	1 lap; 1 lap	1 lap; 1 lap	100%	1 lap; 1 lap	1 lap; 1 lap	100%
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Laporan Bidang Kesos ; perencanaan sektoral bidang kesejahteraan sosial	2 lap; 4 lap	2 lap; 4 lap	2 lap; 4 lap	100%	2 lap; 4 lap	2 lap; 4 lap	100%
	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Meningkatnya keselarasn dokumen perencanaan rumpun perekonomian	6 OPD	6 OPD	6 OPD	100%	6 OPD	6 OPD	100%
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	jumlah dokumen PD bid perekonomian yang mempedomani kebijakan perencanaan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	8 dok	8 dok	8 dok	100%	8 dok	8 dok	100%

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (n-1) (2021))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7 = (6/5)	8	9 = (8)	10 = (8/4)
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Dokumen Perekonomian ; dokumen sektoral Perekonomian	1 dok; 1 dok;	1 dok; 1 dok;	1 dok; 1 dok;	100%	1 dok; 1 dok;	1 dok; 1 dok;	100%
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	jumlah dokumen PD bid SDA yang mempedomani kebijakan perencanaan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	4 dok	4 dok	4 dok	100%	4 dok	4 dok	100%
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Meningkatnya keselarasan dokumen perencanaan rumpun infrastruktur	4 OPD	4 OPD	4 OPD	100%	4 OPD	4 OPD	100%
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan/hasil dokumen perencanaan PD bid infrastruktur	8 dok	8 dok	8 dok	100%	8 dok	8 dok	100%
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Dokumen Infrastruktur ; dokumen sektoral infrastruktur	2 dok; 4 dok	2 dok; 4 dok	2 dok; 3 dok	75%	2 dok; 4 dok	2 dok; 3 dok	75%
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	jumlah dokumen hasil sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan rumpun kewilayahan	2 dok	2 dok	2 dok	100%	2 dok	2 dok	100%

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (n-1) (2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7 = (6/5)	8	9 = (8)	10 = (8/4)
	PROGRAM PENELITIAN dan PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase produk kelitbangan utama yang dimanfaatkan dalam pembangunan daerah	88,57%	85,71%	96,77%	84,17%	85,71%	96,77%	84,17%
		Prosentase Pelaksanaan Kelitbangan pendukung	71,88%	71,88%	100%	49,96%	71,88%	100%	49,96%
	<i>Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan</i>	<i>Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dan pengelolaan data dalam perencanaan pembangunan daerah</i>	83,29%	83,29%	74,50%	88,85%	83,29%	74,50%	88,85%
	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Kerjasama PTN/PTS (KKN) ; Lomba Inovasi ; Pameran Inovasi ; Lap. SIDA : Lap. DRD ; Buku dan Majalah	5 PTN/PTS;	5 PTN/PTS;	5 PTN	100%	5 PTN/PTS;	5 PTN	100%
		<i>Bantuan atau insentif penelitian</i>	12 mhs	12 mhs	12 mhs	100%	12 mhs	12 mhs	100%
		<i>Beasiswa mahasiswa berprestasi</i>	8 mhs	8 mhs	12 mhs	150%	8 mhs	12 mhs	150%
		<i>Beasiswa hafidz/hafidzoh</i>	10 org	10 org	0	0	10 org	0	0
		<i>Penelitian atau kajian</i>	5 kajian	5 kajian	6 kajian tematik	120%	5 kajian	6 kajian tematik	120%

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (n-1) (2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7 = (6/5)	8	9 = (8)	10 = (8/4)
		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	4 Tim (DRD, Majelis Pertimbangan, Tim Pengendali Mutu, Tim Kelitbangan)	4 Tim (DRD, Majelis Pertimbangan, Tim Pengendali Mutu, Tim Kelitbangan)	1	25%	4 Tim (DRD, Majelis Pertimbangan, Tim Pengendali Mutu, Tim Kelitbangan)	1	25%
		Penguatan Ketatalaksanaan	2 Dok (SOP/Pedoman Kelitbangan)	2 Dok (SOP/Pedoman Kelitbangan)	1	50%	2 Dok (SOP/Pedoman Kelitbangan)	1	50%
		Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Evaluasi program	3 dok (RIK, Rencana Kerja Kelitbangan Tahunan, Laporan Evaluasi Kelitbangan)	3 dok (RIK, Rencana Kerja Kelitbangan Tahunan, Laporan Evaluasi Kelitbangan)	1	33,33%	3 dok (RIK, Rencana Kerja Kelitbangan Tahunan, Laporan Evaluasi Kelitbangan)	1	33,33%
	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Analisis Pemerataan pendataan (Williamson); Indeks Pembangunan Desa; Laporan Forum data ; Laporan TPID: Informasi data pembangunan (Website)	1 lap; 1 lap; 1 lap; 1 lap; 1 web	1 lap; 1 lap; 1 lap; 1 lap; 1 web	1 lap; 1 lap; 1 lap; 1 lap; 1 web	100%	1 lap; 1 lap; 1 lap; 1 lap; 1 web	1 lap; 1 lap; 1 lap; 1 lap; 1 web	100%
		Pengembangan Basis Data Kelitbangan	1 laporan forum data	1 laporan forum data	1 laporan forum data	1	1 laporan forum data	1 laporan forum data	1

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (n-1) (2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7 = (6/5)	8	9 = (8)	10 = (8/4)
	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Keselarasan dokumen perencanaan rumpun inovasi dan peningkatan kapasitas kelitbang	100%	100%	80%	80%	100%	80%	80%
	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Peningkatan Kapasitas SDM	2 jenis pelatihan (HAKI, Ijin Produksi)	2 jenis pelatihan (HAKI, Ijin Produksi)	0	0	2 jenis pelatihan (HAKI, Ijin Produksi)	0	0
		Penguatan Kerjasama Kelitbang	3 kerjasama (KKN PT/PTS, Fasilitasi pemasaran produk Inovasi, Fasilitasi Ijin Produksi)	3 kerjasama (KKN PT/PTS, Fasilitasi pemasaran produk Inovasi, Fasilitasi Ijin Produksi)	3 kerjasama (KKN PT/PTS, Fasilitasi pemasaran produk Inovasi, Fasilitasi Ijin Produksi)	100%	3 kerjasama (KKN PT/PTS, Fasilitasi pemasaran produk Inovasi, Fasilitasi Ijin Produksi)	3 kerjasama (KKN PT/PTS, Fasilitasi pemasaran produk Inovasi, Fasilitasi Ijin Produksi)	100%
	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Buku atau majalah penelitian	700 eks	700 eks	500 eks	71,40%	700 eks	500 eks	71,40%
		Fasilitasi Inovasi Daerah	1 lomba Inovasi Daerah	1 lomba Inovasi Daerah	1 lomba Inovasi Daerah	100%	1 lomba Inovasi Daerah	1 lomba Inovasi Daerah	100%

Sumber : Bappedalitbang Kabupaten Tegal, 2022

Dalam tahun anggaran 2021 Bappedalitbang telah melaksanakan 4 program, 14 kegiatan dan 34 sub kegiatan sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bappedalitbang Kabupaten Tegal Tahun 2021.

Dari 4 program, 14 kegiatan dan 34 sub kegiatan tersebut secara umum dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Adapun program , kegiatan dan sub kegiatan APBD Tahun Anggaran 2021, antara lain adalah :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Belanja Modal)

6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
 - 2) Pemeliharaan Mebel
 - 3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

II. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

1. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
 - 1) Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya
 - 2) Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota.
2. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.
 - 1) Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota.
 - 2) Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah

III. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

1. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
 - 1) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan.

- 2) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia.
2. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam).
 - 1) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD).
 - 2) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian.
 - 3) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD).
3. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
 - 1) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur.
 - 2) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur.
 - 3) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan.

IV. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah.

1. Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan.
 - 1) Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah.
 - 2) Pengelolaan Data Kelitbang dan Peraturan.

2. Pengembangan Inovasi dan Teknologi.

- 1) Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi.
- 2) Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif.

Hasil evaluasi terhadap Renja Bappedalitbang Tahun 2021 dapat dijelaskan bahwa secara umum target kinerja tercapai, dimana realisasi pencapaian target kinerja fisik sebesar 99,56% dan realisasi pencapaian target kinerja keuangan adalah 92,74% yaitu dari anggaran sebesar Rp.8.227.371.000,- realisasinya adalah sebesar Rp.7.630.204.545,-, dengan uraian sebagai berikut:

1. Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung berupa Belanja Pegawai yang meliputi Biaya Gaji dan Tunjangan Pagu Anggaran Rp. **2.971.619.000,-** dengan realisasi Rp. 2.843.255.630,- (**95,68 %**).

2. Belanja Langsung

Belanja langsung digunakan untuk membiayai **6** Program dengan jumlah kegiatan sebanyak **16** Kegiatan pagu anggaran Rp. 5.255.752.000,- dan realisasi kinerja kegiatan mencapai Rp. 4.786.948.915,- (**91,08 %**).

Faktor-faktor pendukung pencapaian kinerja program, antara lain:

1. Tersedianya pendanaan yang memadai yang sesuai dengan alokasi anggaran yang telah ditetapkan;
2. Meningkatnya pemahaman dari para Pengelola Kegiatan dalam melaksanakan kegiatan yang diembannya;
3. Tersedianya media dalam rangka pemantauan pelaksanaan kegiatan dan program melalui laporan dan rapat evaluasi bulanan dan triwulan.

Namun demikian masih terdapat kinerja program/kegiatan yang tidak sesuai target kinerja dan program/kegiatan yang direncanakan. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan terdapat beberapa faktor penghambat yang mempengaruhi kinerja, antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) Dikarenakan adanya efisiensi anggaran dalam pelaksanaan kegiatan.
- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, karena dengan adanya kebijakan WFH maka alokasi BBM berkurang dikarenakan operasionalisasi kendaraan dinas.
- 3) Dalam kegiatan rapat-rapat yang direncanakan dilaksanakan beberapa kali bisa dimaksimalkan hasilnya dengan pengurangan jumlah pelaksanaan rapat, dan dengan masih adanya Pandemi *Covid-19* banyak pelaksanaan rapat yang dilaksanakan secara daring sehingga adanya efisiensi.
- 4) Dikarenakan Tahun 2021 pandemi *Covid-19* maka pelaksanaan perjalanan dinas situasional menyesuaikan dengan undangan yang diterima dan pelaksanaan konsultasi banyak yang dilakukan dengan telpon atau daring.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Bappedalitbang

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Penyelenggaraan pelayanan Bappedalitbang adalah melaksanakan fungsi sebagai Lembaga Teknis Penunjang Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan Pengembangan di Kabupaten Tegal, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2021

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan-Badan Daerah Kabupaten Tegal.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Bappedalitbang Kabupaten Tegal mengacu pada penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan. IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah yang mengacu pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2024. Analisis ini salah satunya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran Bappedalitbang Kabupaten Tegal sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Bappedalitbang Kabupaten Tegal

NO	Indikator	SPM/ standar nasiona 1	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi (Renja)		Catatan Analisis
				Tahun 2020 (thn n-2)	Tahun 2021 (thn n-1)	Tahun 2022 (tnn n)	Tahun 2023 (thn n+1)	Tahun 2020 (thn n-2)	Tahun 2021 (thn n-1)	Tahun 2022 (tnn n)	Tahun 2023 (thn n+1) disamakan Target Renstra	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Indikator dan Target Renstra 2020-2021												
1	Indeks Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah		v	95,80	96,88			93,66	91,95			
2	Indeks Kelitbangan dan Pengelolaan Data		v	58,50	83,29			58,37	81,47			
Indikator dan Target Perubahan Renstra 2022-2024												
3	Indeks Perencanaan dan Kelitbangan		v			88,76	90,61	76,02	86,71	88,76	90,61	
4	Indeks Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah		v			91,68	92,76	93,66	93,16	91,68	92,76	
5	Indeks Kelitbangan		v			91,18	94,70	58,37	81,47	91,18	94,70	

Sumber : Bappedalitbang Kabupaten Tegal, 2022

Hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Bappedalitbang tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Renstra Tahun 2019-2024

- a. Tujuan **“Meningkatkan Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah”** dengan sasaran **“Meningkatnya keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah”** memiliki 1 indikator kinerja yaitu **“indeks keselarasan perencanaan pembangunan daerah”**, pada tahun 2020 dimana realisasi capaiannya sebesar 93,66% dari target sebesar 95,80%, dan tahun 2021 dimana realisasi capaiannya sebesar 91,95% dari target sebesar 96,88%;
- b. Tujuan **“Meningkatkan Pemanfaatan Kelitbangan Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah”** dengan sasaran **“Meningkatnya pemanfaatan kelitbangan dalam perencanaan pembangunan daerah”** memiliki 1 indikator kinerja yaitu **“Indeks kelitbangan dan Pengelolaan Data”**, pada tahun 2020 dimana realisasi capaiannya sebesar 58,37% dari target sebesar 58,50%, dan tahun 2021 dimana realisasi capaiannya sebesar 81,47% dari target sebesar 83,29%;

2. Perubahan Renstra Tahun 2019-2024

- a. Tujuan **“Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Kelitbangan”** memiliki 1 indikator kinerja yaitu **“indeks keselarasan perencanaan pembangunan daerah”**, dimana pada tahun 2020 realisasi capaiannya sebesar 76,02% dan tahun 2021 dimana realisasi capaiannya sebesar 86,71%. Memiliki 2 sasaran yaitu;
 - 1) Sasaran **“Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah”** memiliki 1 indikator kinerja yaitu **“Indeks Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah”**, dimana pada tahun 2020 realisasi capaiannya sebesar 93,66% dan tahun 2021 dimana realisasi capaiannya sebesar 91,66%.

- 2) Sasaran “**Meningkatnya kualitas Kelitbangan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah**” memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Indeks Kelitbangan”, dimana pada tahun 2020 realisasi capaiannya sebesar 58,37% dan tahun 2021 dimana realisasi capaiannya sebesar 81,47%.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Bappedalitbang Kabupaten Tegal

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Bappedalitbang Kabupaten Tegal tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Bappeda, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi perencanaan, penelitian dan pengembangan diantaranya :

1. Kecenderungan berkurangnya sumberdaya keuangan (khususnya dana transfer daerah) untuk pendanaan pembangunan daerah;
2. Belum kuatnya komitmen beberapa pemangku kepentingan untuk mempedomani dokumen perencanaan untuk pelaksanaan pembangunan daerah;
3. Belum semua OPD menyusun cascading/pohon kinerja sesuai dengan RPJMD/perubahan RPJMD yang telah ditetapkan;
4. Proses bisnis, SOP maupun juklak/juknis perencanaan pembangunan daerah yang relatif belum lengkap sebagai pedoman operasional perencanaan yang ditetapkan dalam kebijakan;
5. Belum adanya komitmen yang kuat untuk memberdayakan sumberdaya kelitbangan;
6. Pengambilan keputusan/kebijakan strategis belum sepenuhnya menggunakan hasil-hasil penelitian;

7. Keterbatasan sumberdaya litbang baik kualitas maupun kuantitas;
8. Pengarus-utamaan (mainstreaming) inovasi dalam perencanaan pembangunan daerah yang belum sepenuhnya dilaksanakan di OPD (OPD masih berasumsi perlunya alokasi penganggaran khusus sebagai argumen untuk mewujudkan adanya kegiatan yang inovatif)

Permasalahan-permasalahan tersebut di atas, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat berdampak pada pencapaian visi dan misi kepala daerah. Karena itu kedepan perlu diupayakan pemecahannya dalam rangka mengoptimalkan pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Bappedalitbang Kabupaten Tegal, khususnya di tahun 2023 mendatang, yaitu sebagai berikut :

a. Tantangan Pengembangan Pelayanan SKPD

- 1) Mewujudkan perencanaan pembangunan yang aspiratif dengan melibatkan unsur stakeholder dan masyarakat;
- 2) Menyajikan dokumen perencanaan dan data dukung perencanaan Kabupaten Tegal dengan tepat waktu ;
- 3) Melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan, kerjasama dan penelitian pengembangan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
- 4) Meningkatkan kompetensi SDM yang ada di Bappedalitbang Kabupaten Tegal dalam mewujudkan perencanaan pembangunan di Kabupaten Tegal yang baik dan tepat sasaran;
- 5) Mengoptimalkan Teknologi Informasi dalam perencanaan pembangunan.

b. Peluang dalam pelayanan Bappedalitbang Kabupaten Tegal adalah :

- 1) SDM Bappedalitbang Kabupaten Tegal yang memiliki potensi untuk ditingkatkan kompetensinya;
- 2) Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang tatacara perencanaan dan penganggaran;
- 3) Koordinasi dan kerjasama dengan berbagai pihak lain dalam penyediaan informasi dan data dukung perencanaan pembangunan;
- 4) Perkembangan Teknologi Informasi yang diikuti dengan berkembangnya sistem perencanaan pembangunan.

Dengan adanya permasalahan dalam menunjang fungsi pelayanan Bappedalitbang serta peluang yang dimiliki oleh Bappedalitbang, maka dirumuskan isu-isu penting yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan pada tahun 2023.

Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tupoksi Bappedalitbang adalah:

1. Dokumen perencanaan belum disusun tepat waktu;
2. Hasil rekomendasi pengendalian tidak ditindaklanjuti;
3. Dokumen renstra dengan renja rumpun pemerintahan dan pembangunan manusia belum sepenuhnya selaras;
4. Dokumen renstra dengan renja rumpun perekonomian dan SDA belum sepenuhnya selaras;
5. Dokumen renstra dengan renja rumpun Infrastruktur dan kewilayahan belum sepenuhnya selaras;
6. Hasil kelitbangan tidak dimanfaatkan secara optimal dalam perencanaan pembangunan daerah;

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan Awal RKPD merupakan acuan dalam penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah. Selanjutnya dalam proses penyempurnaan Renja dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan perangkat daerah.

Terkait penyusunan Renja Bappedalitbang Kabupaten Tegal Tahun 2023, dilakukan review terhadap Rancangan Awal RKPD, yaitu membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan Bappedalitbang Kabupaten Tegal, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Kabupaten Tegal

Kode Rekening					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analiss Kebutuhan/Rankhir Renja					Catatan Penting
					Program/Kegiatan /Sub Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Sub Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
5	1				PERENCANAAN				8.687.308.000	PERENCANAAN				6.834.760.000	
5	1	1			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota		Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan	100	4.878.458.000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota		Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan	100	4.794.760.000	
5	01	00	02.0		1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Bappedalitbang	Tersusunnya dokumen perencanaan		54.500.000	1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Bappedalitbang	Tersusunnya dokumen perencanaan		99.500.000	
5	1	1	02.0	1	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah		Jumlah Dokumen Renja	1 Dok	44.500.000	1) Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah		Jumlah Dokumen Renja	1 Dok	95.500.000	
5	1	1	02.0	6	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD		Jumlah dokumen laporan kinerja (LKJIP, PMPRB, SAKIP)	3 Dok	10.000.000	2) Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD		Jumlah dokumen laporan kinerja (LKJIP, PMPRB, SAKIP)	3 Dok	4.000.000	
5	01	00	02.0		2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bappedalitbang	Terlaksananya Kebutuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	3.047.429.000	2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bappedalitbang	Terlaksananya Kebutuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	3.186.362.000	
5	1	1	02.0	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS		Gaji dan Tunjangan ASN	12 bln	2.957.429.000	1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS		Gaji dan Tunjangan ASN	12 bln	3.085.082.000	
5	1	1	02.0	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD		Jumlah Laporan Administrasi keuangan	5 Dok	90.000.000	2) Pelaksanaan Penatausahaan dan		Jumlah Laporan Administrasi keuangan	5 Dok	101.280.000	

Kode Rekening					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analiss Kebutuhan/Rankhir Renja					Catatan Penting
					Program/Kegiatan /Sub Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Sub Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										pengujian/verifikasi keuangan SKPD					
							Jumlah honor pengelola keuangan yang dibayarkan	12 bln				Jumlah honor pengelola keuangan yang dibayarkan	12 bln		
5	01	00	02.0	5	3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bappedalitbang	Terlaksananya Kebutuhan Adm. Kepegawaian Perangkat Daerah	100	40.000.000	3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bappedalitbang	Terlaksananya Kebutuhan Adm. Kepegawaian Perangkat Daerah	100	58.000.000	
5	1	1	02.0	9	<i>Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi</i>		Jumlah Diklat Bintek yang diikuti	12 bln	40.000.000	<i>1) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi</i>		Jumlah Diklat Bintek yang diikuti	12 bln	58.000.000	
5	01	00	02.0	6	4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bappedalitbang	Terlaksananya Kebutuhan Adm. Umum Perangkat Daerah	100	303.500.000	4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bappedalitbang	Terlaksananya Kebutuhan Adm. Umum Perangkat Daerah	100	282.329.000	
5	1	1	02.0	1	<i>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</i>		Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	50 buah	20.000.000	<i>1) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</i>		Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	50 buah	20.000.000	
5	1	1	02.0	2	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor	32 item	70.000.000	2) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor	32 item	80.609.000	
							Jumlah Jenis Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	23 item				Jumlah Jenis Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	23 item		
5	1	1	02.0	4	<i>Penyediaan bahan logistik kantor</i>		Jumlah pegawai, tamu, dan	12 bulan	66.500.000	<i>3) Penyediaan bahan logistik kantor</i>		Jumlah pegawai, tamu, dan	12 bulan	66.500.000	

Kode Rekening					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analiss Kebutuhan/Rankhir Renja					Catatan Penting
					Program/Kegiatan /Sub Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Sub Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							peserta rapat mendapatkan jamuan					peserta rapat mendapatkan jamuan			
5	1	1	02.0 6	5	penyediaan barang cetakan dan penggandaan		Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	5 item	35.000.000	4) penyediaan barang cetakan dan penggandaan		Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	5 item	34.550.000	
5	1	1	02.0 6	6	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		Jumlah penyediaan bahan bacaan	12 bulan	12.000.000	5) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		Jumlah penyediaan bahan bacaan	12 bulan	12.000.000	
5	1	1	02.0 6	9	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang terpenuhi	12 bulan	100.000.000	6) Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang terpenuhi	12 bulan	68.670.000	
5	01	00 1	02.0 7		5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	100	355.200.000	5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	100	263.700.000	
5	01	00 1	02.0 7	6	1) Pengadaan peralatan dan mesin lainnya		Jumlah AC	1 Unit	355.200.000	1) Pengadaan peralatan dan mesin lainnya		drone	1 Unit	263.700.000	
							Jumlah Drone	1 unit				Jumlah Laptop	2 unit		
							Jumlah Laptop	2 unit				Jumlah Printer	2 unit		
							Jumlah Printer	2 unit				Scanner	1 unit		
							CCTV	1 unit				Penyaring udara	2 unit		
							Jumlah LCD	1 unit				Speaker aktif	1 unit		
							Jumlah Almari Arsip	1 Unit							
							Jumlah Camera Mirrorless	1 Unit							

Kode Rekening					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analiss Kebutuhan/Rankhir Renja					Catatan Penting
					Program/Kegiatan /Sub Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Sub Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Gasebo Lengkap	1 Unit							
5	01	00	02.0		6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintahan	Bappedalitbang	Persentase ketersediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan	100	201.748.000	6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintahan	Bappedalitbang	Persentase ketersediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan	100	203.548.000	
5	1	1	02.0	1	1) Penyediaan jasa surat menyurat		Jumlah perangko dan materai	350 buah	2.000.000	1) Penyediaan jasa surat menyurat		Jumlah perangko dan materai	350 buah	2.000.000	
5	1	1	02.0	2	2) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		Jumlah komunikasi, air dan listrik yang terpenuhi	12 bulan	188.000.000	2) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		Jumlah komunikasi, air dan listrik yang terpenuhi	12 bulan	188.000.000	
5	1	1	02.0	4	3) Penyediaan jasa pelayanan umum kantor		Jumlah bpjs kesehatan thl yang terbayarkan	12 bulan	11.748.000	3) Penyediaan jasa pelayanan umum kantor		Jumlah bpjs kesehatan thl yang terbayarkan	12 bulan	13.548.000	
5	01	00	02.0		7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan	Bappedalitbang	Terlaksananya Pemeliharaan barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan	100	876.081.000	7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan	Bappedalitbang	Terlaksananya Pemeliharaan barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan	100	701.321.000	
5	1	1	02.0	1	1) Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan		servis kendaraan	1 tahun	252.000.000	1) Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan		servis kendaraan	1 tahun	247.681.000	
							suku cadang	59 buah				suku cadang	59 buah		
							BBM	12.614 liter				BBM	12.614 liter		
							STNK	1 tahun				STNK	1 tahun		

Kode Rekening					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analiss Kebutuhan/Rankhir Renja					Catatan Penting
					Program/Kegiatan /Sub Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Sub Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1	1	02.0 9	5	2) Pemeliharaan mebel		Jumlah pemeliharaan mebeleur	1.785 m2	10.000.000	2) Pemeliharaan mebel		Jumlah pemeliharaan mebeleur	1.785 m2	10.000.000	
5	1	1	02.0 9	6	3) Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya		Jumlah peralatan kantor dan mesin lainnya yang terpelihara	99 buah	89.000.000	3) Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya		Jumlah peralatan kantor dan mesin lainnya yang terpelihara	99 buah	89.280.000	
5	1	1	02.0 9	9	4) Pemeliharaan/rehabilitas gedung kantor atau bangunan lainnya		Jumlah pemeliharaan gedung kantor atau bangunan lainnya	12 bulan	525.081.000	4) Pemeliharaan/rehabilitas gedung kantor atau bangunan lainnya		Jumlah pemeliharaan gedung kantor atau bangunan lainnya	12 bulan	354.360.000	
5	1	2			Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah		Persentase Dokumen Perencanaan disusun sesuai tahapan dan Kebijakan anggaran	100	1.905.000.000	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah		Persentase Dokumen Perencanaan disusun sesuai tahapan dan Kebijakan anggaran	100	750.000.000	
							Persentase hasil rekomendasi pengendalian yang ditindaklanjuti	80				Persentase hasil rekomendasi pengendalian yang ditindaklanjuti	80		
5	01	00 2	02.0 1		1. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Daerah	Bappedalitbang	Peresentase tahapan penyusunan dokumen perencanaan yang dilaksanakan	100	1.025.000.000	1. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Daerah	Bappedalitbang	Peresentase tahapan penyusunan dokumen perencanaan yang dilaksanakan	100	480.000.000	
5	1	2	02.0 1	3	1) Pelaksanaan Konsultasi Publik		Terselenggaranya Konsultasi Publik	1 kali	50.000.000	1) Pelaksanaan Konsultasi Publik		Terselenggaranya Konsultasi Publik	1 kali	50.000.000	
5	1	2	02.0 1	5	2) Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota		Terselenggaranya Musrenbang Kabupaten	1 kali	130.000.000	2) Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota		Terselenggaranya Musrenbang Kabupaten	1 kali	150.000.000	

Kode Rekening						Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan/Rankhir Renja					Catatan Penting
						Program/Kegiatan /Sub Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Sub Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1	2	02.0 1	7	3) Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen RPJPD, RPJMD Teknokratik, RKP, RKP, RKP	2 Dok	845.000.000	3) Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen RPJPD, RPJMD Teknokratik, RKP, RKP, RKP	2 Dok	280.000.000		
5	01	00 2	02.0 2		2. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappedalitbang	Persentase ketersediaan data dan informasi yang dimanfaatkan dalam penyusunan dokumen perencanaan	99	260.000.000	2. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappedalitbang	Persentase ketersediaan data dan informasi yang dimanfaatkan dalam penyusunan dokumen perencanaan	99	75.000.000		
5	01	00 2	02.0 2	1	1) Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Jumlah data dan informasi untuk penyusunan perencanaan pembangunan daerah	1 dok	200.000.000	1) Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Jumlah data dan informasi untuk penyusunan perencanaan pembangunan daerah	1 dok	50.000.000		
5	01	00 2	02.0 2	2	2) Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Profil Pembangunan Daerah	1 dok	60.000.000	2) Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Profil Pembangunan Daerah	1 dok	25.000.000		
5	01	00 2	02.0 3		3. Pengendalian, Evaluasi dan pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappedalitbang	Persentase rekomendasi yang dihasilkan atas pengendalian evaluasi dan pelaporan	100	620.000.000	3. Pengendalian, Evaluasi dan pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappedalitbang	Persentase rekomendasi yang dihasilkan atas pengendalian evaluasi dan pelaporan	100	195.000.000		

Kode Rekening					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analiss Kebutuhan/Rankhir Renja					Catatan Penting
					Program/Kegiatan /Sub Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Sub Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	01	00	02.0	1	1) Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan evaluasi hasil RKPD	1 Laporan	220.000.000	1) Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan evaluasi hasil RKPD	1 Laporan	50.000.000	
							LKPJ dan AMJ LKPJ	2 dok				LKPJ dan AMJ LKPJ	2 dok		
							Laporan evaluasi RPJMD					Laporan evaluasi RPJMD			
							Laporan evaluasi RPJPD					Laporan evaluasi RPJPD			
5	01	00	02.0	2	2) Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah		Jumlah Laporan Koordinasi dan pelaporan pelaksanaan pengendalian pelaksanaan kerjasama daerah	1 Laporan	100.000.000	3) Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah		Jumlah Laporan Koordinasi dan pelaporan pelaksanaan pengendalian pelaksanaan kerjasama daerah	1 Laporan	20.000.000	
5	01	00	02.0	3	3) Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah		Rakor TEPR	2 kali	300.000.000	2) Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah		Rakor TEPR	2 kali	125.000.000	
							Laporan DAK	1 Laporan				Laporan DAK	1 Laporan		
							Laporan Banprov	1 Laporan				Laporan Banprov	1 Laporan		
5	1	3			Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah		Tingkat Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah rumpun Bidang	91,77	1.903.850.000	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah		Tingkat Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah rumpun Bidang	91,77	1.290.000.000	

Kode Rekening					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analiss Kebutuhan/Rankhir Renja					Catatan Penting
					Program/Kegiatan /Sub Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Sub Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Pemerintahan dan Pembangunan Manusia					Pemerintahan dan Pembangunan Manusia			
							Tingkat Keselarasan Dokumen Perencanaan rumpun Bidang Perekonomian dan SDA	93,17				Tingkat Keselarasan Dokumen Perencanaan rumpun Bidang Perekonomian dan SDA	93,17		
							Tingkat Keselarasan Dokumen Perencanaan rumpun Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	93,45				Tingkat Keselarasan Dokumen Perencanaan rumpun Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	93,45		
5	01	003	02.01		1. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Bappedalitbang	<i>Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah rumpun Bidang Pemerintahan yang selaras</i>	92,19	666.196.000	1. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Bappedalitbang	<i>Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah rumpun Bidang Pemerintahan yang selaras</i>	92,19	500.000.000	
							<i>Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah rumpun Bidang Pembangunan</i>	91,88				<i>Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah rumpun Bidang Pembangunan</i>	91,88		

Kode Rekening					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analiss Kebutuhan/Rankhir Renja					Catatan Penting
					Program/Kegiatan /Sub Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Sub Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							<i>Manusia yang selaras</i>					<i>Manusia yang selaras</i>			
							<i>Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah rumpun Bidang Kesejahteraan Masyarakat yang selaras</i>	91,25				<i>Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah rumpun Bidang Kesejahteraan Masyarakat yang selaras</i>	91,25		
5	01	00	02.0	1	1) Koordinasi penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Darrah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		jumlah dokumen PD bid pemerintahan yang mempedomani kebijakan perencanaan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	60 dok koordinasi	55.000.000	1) Koordinasi penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Darrah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		jumlah dokumen PD bid pemerintahan yang mempedomani kebijakan perencanaan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	60 dok koordinasi	30.000.000	
5	01	00	02.0	2	2) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		jumlah dokumen PD bidang pemerintahan yg disusun sesuai tahapan (Renja dan Renstra)	60 dok koordinasi	55.000.000	2) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		jumlah dokumen PD bidang pemerintahan yg disusun sesuai tahapan (Renja dan Renstra)	60 dok koordinasi	30.000.000	
5	01	00	02.0	3	3) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan		jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan/hasil dokumen perencanaan	120 dok monev	75.000.000	3) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan		jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan/hasil dokumen perencanaan	120 dok monev	30.000.000	

Kode Rekening					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analiss Kebutuhan/Rankhir Renja					Catatan Penting
					Program/Kegiatan /Sub Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Sub Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		PD bid pemerintahan			Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		PD bid pemerintahan			
5	01	00	02.0	4	4) Koordinasi Pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan		jumlah dokumen hasil sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan rumpun pemerintahan	1 dok sinergitas	55.000.000	4) Koordinasi Pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan		jumlah dokumen hasil sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan rumpun pemerintahan	1 dok sinergitas	30.000.000	
5	01	00	02.0	5	5) Koordinasi Penyusunan Dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		jumlah dokumen PD bidang PM dan Kesmas yg disusun sesuai tahapan (Renja dan Renstra)	16 dok koordinasi	100.000.000	5) Koordinasi Penyusunan Dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		jumlah dokumen PD bidang PM dan Kesmas yg disusun sesuai tahapan (Renja dan Renstra)	16 dok koordinasi	60.000.000	
5	01	00	02.0	6	6) Asistensi Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pembangunan manusia		jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan/hasil dokumen perencanaan PD bid PM dan Kesmas	16 dok asistensi	100.000.000	6) Asistensi Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pembangunan manusia		jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan/hasil dokumen perencanaan PD bid PM dan Kesmas	16 dok asistensi	60.000.000	
5	01	00	02.0	7	7) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang		jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan/hasil dokumen perencanaan PD bid PM & Kesmas	32 dok monev	125.000.000	7) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang		jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan/hasil dokumen perencanaan PD bid PM & Kesmas	32 dok monev	60.000.000	

Kode Rekening					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analiss Kebutuhan/Rankhir Renja					Catatan Penting
					Program/Kegiatan /Sub Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Sub Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Pembangunan Manusia					Pembangunan Manusia					
5	01	00	02.0	8	8) Koordinasi Pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia		jumlah dokumen hasil sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan rumpun PM & Kesmas	3 dok sinergitas	101.196.000	8) Koordinasi Pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia		jumlah dokumen hasil sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan rumpun PM & Kesmas	3 dok sinergitas	200.000.000	
5	01	00	02.0		2. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA	Bappedalitbang	Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah rumpun Bidang Perekonomian yang selaras	92,45	501.364.000	2. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA	Bappedalitbang	Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah rumpun Bidang Perekonomian yang selaras	92,45	340.000.000	
							Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah rumpun Bidang SDA yang selaras	93,89				Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah rumpun Bidang SDA yang selaras	93,89		
5	01	00	02.0	1	1) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian		jumlah dokumen PD bid perekonomian yang mempedomani kebijakan perencanaan	8 dok	94.964.000	1) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian		jumlah dokumen PD bid perekonomian yang mempedomani kebijakan perencanaan	8 dok	60.000.000	

Kode Rekening					Rancangan Awal RKP					Hasil Analiss Kebutuhan/Rankhir Renja					Catatan Penting
					Program/Kegiatan /Sub Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Sub Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					(RPJPD, RPJMD dan RKP)		daerah (RPJPD, RPJMD dan RKP)			(RPJPD, RPJMD dan RKP)		daerah (RPJPD, RPJMD dan RKP)			
5	01	00	02.0	2	2) Asistensi Penyusunan Dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang perekonomian		jumlah dokumen PD bidang perekonomian yg disusun sesuai tahapan (Renja dan Renstra)	8 dok	90.000.000	2) Asistensi Penyusunan Dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang perekonomian		jumlah dokumen PD bidang perekonomian yg disusun sesuai tahapan (Renja dan Renstra)	8 dok	30.000.000	
5	01	00	02.0	3	3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang perekonomian		jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan/hasil dokumen perencanaan PD bid perekonomian	16 dok	51.400.000	3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang perekonomian		jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan/hasil dokumen perencanaan PD bid perekonomian	16 dok	30.000.000	
5	01	00	02.0	4	4) Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian		jumlah dokumen hasil sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan rumpun perekonomian	2 dok	50.000.000	4) Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian		jumlah dokumen hasil sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan rumpun perekonomian	2 dok	60.000.000	
5	01	00	02.0	5	5) Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKP)		jumlah dokumen PD bid SDA yang mempedomani kebijakan perencanaan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKP)	4 dok	85.000.000	5) Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKP)		jumlah dokumen PD bid SDA yang mempedomani kebijakan perencanaan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKP)	4 dok	50.000.000	

Kode Rekening						Rancangan Awal RKPD					Hasil Analiss Kebutuhan/Rankhir Renja					Catatan Penting
						Program/Kegiatan /Sub Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Sub Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	01	00	02.0	6	6) Asistensi Penyusunan Dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang SDA		jumlah dokumen PD bidang SDA yg disusun sesuai tahapan (Renja dan Renstra)	4 dok	40.000.000	6) Asistensi Penyusunan Dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang SDA		jumlah dokumen PD bidang SDA yg disusun sesuai tahapan (Renja dan Renstra)	4 dok	30.000.000		
5	01	00	02.0	7	7) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang SDA		jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan/hasil dokumen perencanaan pembangunan PD bid SDA	8 dok	50.000.000	7) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang SDA		jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan/hasil dokumen perencanaan pembangunan PD bid SDA	8 dok	30.000.000		
5	01	00	02.0	8	8) Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang SDA		jumlah dokumen hasil sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan rumpun SDA	2 dok	40.000.000	8) Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang SDA		jumlah dokumen hasil sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan rumpun SDA	2 dok	50.000.000		
5	01	00	02.0		3. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Bappedalitbang	Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah rumpun Bidang Infrastruktur yang selaras	92,48	736.290.000	3. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Bappedalitbang	Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah rumpun Bidang Infrastruktur yang selaras	92,48	450.000.000		
							Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah rumpun Bidang Kewilayahan yang selaras	94,42				Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah rumpun Bidang Kewilayahan yang selaras	94,42			

Kode Rekening					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analiss Kebutuhan/Rankhir Renja					Catatan Penting
					Program/Kegiatan /Sub Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Sub Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	01	00	02.0	1	1) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		jumlah dokumen PD bid infrastruktur yang mempedomani kebijakan perencanaan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4 dok	47.290.000	1) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		jumlah dokumen PD bid infrastruktur yang mempedomani kebijakan perencanaan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4 dok	40.000.000	
5	01	00	02.0	2	2) Asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang infrastruktur		jumlah dokumen PD bidang infrastruktur yg disusun sesuai tahapan (Renja dan Renstra)	4 dok	50.000.000	2) Asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang infrastruktur		jumlah dokumen PD bidang infrastruktur yg disusun sesuai tahapan (Renja dan Renstra)	4 dok	40.000.000	
5	01	00	02.0	3	3) Pelaksanaan monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan/hasil dokumen perencanaan PD bid infrastruktur	8 dok	75.000.000	3) Pelaksanaan monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan/hasil dokumen perencanaan PD bid infrastruktur	8 dok	50.000.000	
5	01	00	02.0	4	4) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur		jumlah dokumen hasil sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan rumpun infrastruktur	2 dok	185.000.000	4) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur		jumlah dokumen hasil sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan rumpun infrastruktur	2 dok	100.000.000	

Kode Rekening					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analiss Kebutuhan/Rankhir Renja					Catatan Penting
					Program/Kegiatan /Sub Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Sub Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	01	00	02.0	5	5) Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		jumlah dokumen PD bid kewilayahan yang mempedomani kebijakan perencanaan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4 dok	50.000.000	5) Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		jumlah dokumen PD bid kewilayahan yang mempedomani kebijakan perencanaan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4 dok	40.000.000	
5	01	00	02.0	6	6) Asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang kewilayahan		jumlah dokumen PD bidang kewilayahan yg disusun sesuai tahapan (Renja dan Renstra)	4 dok	59.000.000	6) Asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang kewilayahan		jumlah dokumen PD bidang kewilayahan yg disusun sesuai tahapan (Renja dan Renstra)	4 dok	40.000.000	
5	01	00	02.0	7	7) Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah rumpun bidang kewilayahan		jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan/h asil dokumen perencanaan PD bid kewilayahan	8 dok	75.000.000	7) Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah rumpun bidang kewilayahan		jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan/h asil dokumen perencanaan PD bid kewilayahan	8 dok	50.000.000	
5	01	00	02.0	8	8) Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan		jumlah dokumen hasil sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan rumpun kewilayahan	2 dok	195.000.000	8) Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan		jumlah dokumen hasil sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan rumpun kewilayahan	2 dok	90.000.000	
5	5				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				1.331.959.000	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				999.000.000	

Kode Rekening					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analiss Kebutuhan/Rankhir Renja					Catatan Penting
					Program/Kegiatan /Sub Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Sub Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	5	2			Program Penelitian dan Pengembangan		Persentase Dukungan Produk Kelitbang dalam Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.	73,44	1.331.959.000	Program Penelitian dan Pengembangan		Persentase Dukungan Produk Kelitbang dalam Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.	73,44	999.000.000	
							Skor Inovasi	5.000				Skor Inovasi	5.000		
5	05	00 2	02.0 1		1. Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Bappedalitbang	Jumlah rekomendasi litbang Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan mendukung Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.	73,44	180.000.000	1. Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Bappedalitbang	Jumlah rekomendasi litbang Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan mendukung Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.	73,44	105.000.000	
5	5	2	02.0 1	2	Fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan Pemerintahan umum		Jumlah Rekomendasi Kajian Mandiri mendukung Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.	1 dok rekomendasi	75.000.000	1) Fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan Pemerintahan umum		Jumlah Rekomendasi Kajian Mandiri mendukung Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.	1 dok rekomendasi	50.000.000	
5	5	2	02.0 1	12	Pengelolaan Data Kelitbang dan Peraturan		Jumlah Laporan Forum Data Kelitbang	1 laporan	75.000.000	2) Pengelolaan Data Kelitbang dan Peraturan		Jumlah Laporan Forum Data Kelitbang	1 laporan	35.000.000	

Kode Rekening					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analiss Kebutuhan/Rankhir Renja					Catatan Penting
					Program/Kegiatan /Sub Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Sub Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	5	2	02.0 1	14	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan		Jumlah Laporan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD).	1 laporan	30.000.000	3) Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan		Jumlah Laporan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD).	1 laporan	20.000.000	
5	05	00 2	02.0 2		2. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Bappedalitbang	Jumlah Rekomendasi Litbang Bidang Sosial dan Kependudukan mendukung Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.	91,89	240.459.000	2. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Bappedalitbang	Jumlah Rekomendasi Litbang Bidang Sosial dan Kependudukan mendukung Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.	91,89	149.000.000	
5	5	2	02.0 2	3	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan		Jumlah Mahasiswa Berprestasi dan insentif penelitian mahasiswa/ masyarakat di wilayah Kabupaten Tegal	7 Mahasiswa Berprestasi dan 7 Dokumen Rekomendasi	115.459.000	1) Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan		Jumlah Mahasiswa Berprestasi dan insentif penelitian mahasiswa/ masyarakat di wilayah Kabupaten Tegal	7 Mahasiswa Berprestasi dan 7 Dokumen Rekomendasi	119.000.000	
5	5	2	03.0 2	4	Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga		Jumlah Rekomendasi Litbang tematik Bidang Kepemudaan dan Olahraga mendukung Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi	1 Penelitian tematik	35.000.000						

Kode Rekening					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analiss Kebutuhan/Rankhir Renja					Catatan Penting
					Program/Kegiatan /Sub Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Sub Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	5	2	04.0 2	5	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata		Jumlah Rekomendasi Litbang tematik Bidang Pariwisata mendukung Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.	1 Penelitian tematik	35.000.000						
5	5	2	05.0 2	6	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan		Jumlah Rekomendasi Litbang tematik Bidang Kesehatan mendukung Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.	1 Penelitian tematik	35.000.000						
5	5	2	02.0 2	10	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat		Jumlah Rekomendasi Litbang tematik Partisipasi Masyarakat mendukung Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.	3 penelitian masyarakat	20.000.000	2) Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat		Jumlah Rekomendasi Litbang tematik Partisipasi Masyarakat mendukung Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.	3 penelitian masyarakat	30.000.000	
5	05	00 2	02.0 3		3. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Bappedalitbang	Persentase Rekomendasi Penelitian dan Pembangunan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	91,89	308.500.000	3. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Bappedalitbang	Persentase Rekomendasi Penelitian dan Pembangunan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	91,89	130.000.000	

Kode Rekening					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analiss Kebutuhan/Rankhir Renja					Catatan Penting
					Program/Kegiatan /Sub Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Sub Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							<i>yang terpenuhi</i>					<i>yang terpenuhi</i>			
5	5	2	02.0 3	1	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		Jumlah Rekomendasi Litbang Tematik Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mendukung Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.	1 Penelitian tematik	35.000.000						
5	5	2	03.0 3	2	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan		Jumlah Rekomendasi Litbang Tematik Bidang Perindustrian dan Perdagangan mendukung Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.	1 Penelitian tematik	35.000.000						
5	5	2	02.0 3	4	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan		Jumlah Rekomendasi Litbang Tematik Bidang Pertanian, Perkebunan dan Pangan	1 Penelitian tematik	35.000.000	1) Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan		Jumlah Rekomendasi Litbang Tematik Bidang Pertanian, Perkebunan dan Pangan	1 Penelitian tematik	30.000.000	

Kode Rekening					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analiss Kebutuhan/Rankhir Renja					Catatan Penting
					Program/Kegiatan /Sub Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Sub Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							mendukung Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.					mendukung Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.			
5	5	2	02.03	7	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup		Jumlah Rekomendasi Litbang tematik Partisipasi Masyarakat mendukung Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.	1 Penelitian tematik	35.000.000						
5	5	2	02.03	11	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman		Jumlah Rekomendasi Litbang Tematik Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman mendukung Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.	1 Penelitian tematik	35.000.000						
5	5	2	02.03	12	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan		Jumlah Rekomendasi Litbang Tematik Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan	1 Kajian Kawasan Perdesaan	98.500.000	2) Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan		Jumlah Rekomendasi Litbang Tematik Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan	1 Kajian Kawasan Perdesaan	100.000.000	

Kode Rekening					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analiss Kebutuhan/Rankhir Renja					Catatan Penting
					Program/Kegiatan /Sub Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Sub Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							mendukung Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.					mendukung Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.			
5	5	2	02.03	13	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika		Jumlah Rekomendasi Litbang Tematik Bidang Komunikasi dan Informatika mendukung Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.	1 Penelitian tematik	35.000.000						
5	05	002	02.04		4. Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Bappedalitbang	Persentase Jumlah produk inovasi yang dikembangkan.	87,4	603.000.000	4. Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Bappedalitbang	Persentase Jumlah produk inovasi yang dikembangkan.	87,4	615.000.000	
5	5	2	02.04	1	1) Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi		Jumlah Produk Inovasi yang dihasilkan dalam kontes KreNOVA	1 Kontes KreNOVA	198.000.000	1) Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi		Jumlah Produk Inovasi yang dihasilkan dalam kontes KreNOVA	1 Kontes KreNOVA	242.150.000	
5	5	2	02.04	2	2) Uji coba dan Penerapan rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi		Jumlah Komunitas Inovasi Masyarakat yang berkembang dan mandiri.	2 komunitas berkembang dan mandiri	130.000.000	2) Uji coba dan Penerapan rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi		Jumlah Komunitas Inovasi Masyarakat yang berkembang dan mandiri.	2 komunitas berkembang dan mandiri	141.850.000	

Kode Rekening					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analiss Kebutuhan/Rankhir Renja					Catatan Penting
					Program/Kegiatan /Sub Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Sub Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Desa yang Mendapat Pendampingan Sistem Inovasi Daerah.	1 desa, 1 inovasi				Jumlah Desa yang Mendapat Pendampingan Sistem Inovasi Daerah.	1 desa, 1 inovasi		
							Jumlah Fasilitas dan Pemanfaatan Hasil Inovasi Lembaga/ Perguruan Tinggi.	5 Inovasi PTN/PTS				Jumlah Fasilitas dan Pemanfaatan Hasil Inovasi Lembaga/ Perguruan Tinggi.	5 Inovasi PTN/PTS		
5	5	2	02.04	3	3) Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat Inovatif		Jumlah OPD yang mendapat Fasilitas Penyelenggaraan Inovasi (IGA, KIPP, PUJA INDAH)	48 OPD	70.000.000	3) Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat Inovatif		Jumlah OPD yang mendapat Fasilitas Penyelenggaraan Inovasi (IGA, KIPP, PUJA INDAH)	48 OPD	95.950.000	
5	5	2	02.04	4	4) Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-hasil Kelitbangan		website bappeda dan litbang yang informatif dan update	1 website	105.000.000	4) Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-hasil Kelitbangan		website bappeda dan litbang yang informatif dan update	1 website	84.850.000	
							Jumlah majalah yang diterbitkan	500 eksemplar				Jumlah majalah yang diterbitkan	500 eksemplar		
5	5	2	02.04	5	5) Fasilitas Hak Kekayaan Intelektual		Jumlah Fasilitas HAKI Kreator dan Inovator Kabupaten Tegal	2 produk	100.000.000	5) Fasilitas Hak Kekayaan Intelektual		Jumlah Fasilitas HAKI Kreator dan Inovator Kabupaten Tegal	2 produk	50.200.000	
					TOTAL PAGU INDIKATIF					10.019.267.000					
										TOTAL PAGU INDIKATIF					7.833.760.000

Sumber : Bappedalitbang Kabupaten Tegal, 2022

RKPD Kabupaten Tegal Tahun 2023 yang berisi Rencana Kerja Pemerintah Daerah baik di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan maupun Kemasyarakatan akan dapat terwujud manakala berbagai pihak bisa mengambil peran dan berpartisipasi aktif.

Bappedalitbang adalah salah satu sub sistem yang ikut berperan dalam melaksanakan program/kegiatan/sub kegiatan sebagaimana dalam RKPD 2023. Dalam hal ini maka sesuai salah satu sasaran yang akan dicapai dalam RKPD 2023 adalah mengoptimalkan fungsi Bappedalitbang dalam membantu Kinerja Bupati melalui pelaksanaan urusan pemerintahan yang meliputi urusan perencanaan dan penelitian pengembangan.

Bappedalitbang berupaya mengikuti seluruh tahapan proses perencanaan pembangunan daerah termasuk mengikuti Musrenbang RKPD yang merupakan rangkaian penyusunan RKPD. Materi Musrenbang RKPD adalah rancangan RKPD yang terdiri dari rancangan Renja SKPD, sehingga hasil dari Musrenbang RKPD baik yang berupa koreksi maupun masukan bisa jadi berpengaruh terhadap Renja SKPD.

Mencermati materi rancangan awal RKPD maka disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Penyusunan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Renja Bappedalitbang Tahun 2023 mendasari pada Rancangan RKPD Tahun 2023 yang telah dilakukan penyelarasan dengan Perubahan RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019 – 2024.
2. Penyusunan usulan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dibatasi melalui Pagu Indikatif SKPD;

3. SKPD menyusun program kegiatannya berdasarkan prioritas dan sangat memungkinkan terjadi pengurangan anggaran pada prioritas anggaran yang lain.
4. Diperlukan tambahan anggaran di luar pagu indikatif SKPD guna memenuhi kebutuhan SKPD agar kinerja pelayanan SKPD dapat berjalan lebih optimal.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Perencanaan pembangunan tahunan Kabupaten Tegal selain mengacu pada RPJPD dan RPJMD juga merupakan penjabaran Visi dan Misi Kepala Daerah melalui arah kebijakan pembangunan tahunan yang dalam perumusan dan penyusunannya melibatkan berbagai unsur masyarakat, meliputi LSM, Perguruan Tinggi, Tokoh masyarakat, Tokoh agama, kelompok usaha dan DPRD.

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2023 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2022, yaitu melalui Rembug Warga, Musrenbang Desa/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kabupaten. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijangkau berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan. Bappedalitbang memiliki tanggung jawab dalam mengkoordinasikan pengakomodiran usulan-usulan tersebut dalam perencanaan pada Perangkat Daerah terkait.

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2023 Bappedalitbang Kabupaten Tegal

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Nihil				

Sumber : Bappedalitbang Kabupaten Tegal, 2022

Dalam proses penyusunan perencanaan tersebut diatas tidak ada usulan secara khusus yang di tujukan kepada Bappedalitbang Kabupaten Tegal, umumnya aspirasi diarahkan pada Perangkat Daerah Teknis sehingga tahun 2023 di Bappedalitbang Kabupaten Tegal tidak ada kegiatan yang bersumber dari usulan masyarakat.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN RENJA BAPPEDA DAN LITBANG

3.1. Telaah Terhadap Arah Kebijakan Nasional

Sebagaimana diketahui bahwa Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan bagian penting dari sistem manajemen Pemerintahan Daerah. Salah satu Kebijakan Nasional adalah Pembangunan berkelanjutan. Prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan telah ditetapkan sebagai salah satu kebijakan dalam RPJP 2005-2025 dan RPJMN (2020-2024).

Telaah Kebijakan Nasional di daerah adalah bagaimana pembangunan dalam setiap aspek berjalan dengan sinergis dan sinkron untuk menjamin keberlanjutannya. Tema yang diusung dalam Rencana Kerja Pembangunan Nasional Tahun 2023 adalah “Peningkatan Produktivitas Untuk Transformasi Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan”. Adapun Arah Kebijakan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 diarahkan untuk :

- 1) Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
- 2) Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam hal kesehatan dan pendidikan;
- 3) Penanggulangan pengangguran yang disertai peningkatan *decent job*;
- 4) Mendorong pemulihan dunia usaha;
- 5) Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan dalam rangka mendorong produktivitas;
- 6) Ekonomi hijau;
- 7) Percepatan pembangunan infrastruktur dasar, antara lain air bersih dan sanitasi.

Target sasaran pembangunan yang ditetapkan pada tahun 2023 antara lain meliputi :

- a. Pertumbuhan Ekonomi pada kisaran 5,3 – 5,9 %;

- b. Penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 27 %;
- c. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada kisaran 5,3 – 6 %;
- d. Rasio Gini sebesar 0,375 - 0,378;
- e. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 73,29 - 73,35;
- f. Tingkat Kemiskinan pada kisaran 7 - 8 %;
- g. Nilai Tukar Petani (NTP) pada kisaran 103 – 105;
- h. Nilai Tukar Pelayan (NTN) pada kisaran 105 – 107.

Dalam mewujudkan keselarasan pembangunan dan memaksimalkan pencapaian pembangunan wilayah Kabupaten Tegal sebagai bagian dan satu kesatuan pembangunan di lingkup Provinsi Jawa Tengah, maka keberhasilan pembangunan Provinsi juga dipengaruhi oleh dukungan dan keberhasilan pembangunan dari daerah Kabupaten/Kota.

Arah kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Tengah tahun 2023 ditujukan pada “Perwujudan Masyarakat Jawa Tengah Yang Semakin Sejahtera Dan Berdikari”, dengan prioritas daerah diarahkan pada :

- a. Pemantapan pengurangan kemiskinan dan pengangguran;
- b. Pemantapan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Jawa Tengah Menuju SDM Jawa Tengah Berdaya Saing;
- c. Pemantapan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan dan semakin berdikari;
- d. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan kondusivitas wilayah serta pemantapan kapasitas fiskal daerah.

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan sejalan dengan visi dan misi pembangunan Jawa Tengah lima tahun kedepan, ditetapkan arah kebijakan yang akan menjadi arah kebijakan perencanaan pembangunan tahunan dalam lima tahun. Arah kebijakan ini diharapkan menjadi acuan dan pedoman

penentuan fokus dan prioritas pembangunan setiap tahunnya selama lima tahun kedepan.

Selanjutnya pada tingkat kabupaten, pembangunan Kabupaten Tegal merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu prioritas pembangunan Kabupaten Tegal yang dirumuskan harus saling bersinergi dan berkesinambungan dengan prioritas pembangunan baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional.

Tema pembangunan Kabupaten Tegal pada tahun 2023 adalah **“PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR EKONOMI, BUDAYA, DAN LINGKUNGAN HIDUP YANG NYAMAN”**. Berdasarkan tema tersebut arah kebijakan tahun 2023 diarahkan pada aspek penumbuhan dan akselerasi perekonomian wilayah. Berbagai infrastruktur penunjang ekonomi baik skala kecil maupun skala besar perlu dipenuhi kebutuhannya berdasarkan skala prioritas. Pada tahap ini juga pengembangan seni-budaya dikolaborasikan dengan pengembangan sektor pariwisata.

Pembangunan dan pengembangan obyek/destinasi wisata mulai digerakkan khususnya pada aspek pembangunan dan penataan fasilitas dan jasa pariwisata. Untuk mendukung kualitas lingkungan hidup, maka eco-tourism menjadi tema pembangunan pariwisata.

Adapun prioritas kebijakan tahun 2023 antara lain:

1) Penguatan kualitas layanan pemerintahan dan efektifitas pembangunan yang inovatif dan berbasis TIK; fokus kebijakan pada:

- a) Perbaikan dan penataan sistem pelayanan prima kepada masyarakat
- b) Difusi produk kelitbangan dalam pembangunan yang inovatif
- c) Peningkatan Pengawasan, Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
- d) Penguatan kapasitas ASN dan penerapan merit sistem

2) Perluasan akses infrastruktur dasar dan konektivitas wilayah serta Peningkatan kualitas lingkungan hidup; fokus kebijakan pada:

- a) Percepatan pemerataan infrastruktur wilayah
- b) Penataan ruang kota dan permukiman
- c) Peningkatan kualitas layanan dan sarana transportasi
- d) Peningkatan kualitas pencegahan dan pengelolaan limbah pencemar lingkungan
- e) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan

3) Pemulihan dan transformasi sektor pertanian, perdagangan, industri, Koperasi dan UKM, pariwisata dan iklim investasi ramah lingkungan; fokus kebijakan pada:

- a) Penyiapan dan Pengembangan sektor perikanan kreatif ramah lingkungan
- b) Penyiapan dan Pengembangan Sektor Pertanian kreatif Meliputi Tanaman Pangan Holtikultura, Perkebunan dan Peternakan ramah lingkungan
- c) Penguatan dan diversifikasi pangan
- d) Penyehatan dan pengembangan industri pengolahan dan industri kreatif ramah lingkungan
- e) penguatan dan pengembangan destinasi wisata ramah lingkungan
- f) Peningkatan efektifitas Pemasaran Wisata
- g) Pengembangan SDM pariwisata kreatif
- h) Penguatan Fungsi Pasar Tradisional Era tatanan baru
- i) Pemulihan dan pengembangan UMKM

4) Penguatan mutu dan transformasi pendidikan dan kesehatan era tatanan baru; fokus kebijakan pada:

- a) Peningkatan akses layanan pendidikan dasar berbasis TIK
- b) Peningkatan Minat dan Budaya Baca Masyarakat berbasis TIK
- c) Peningkatan akses layanan kesehatan dasar berbasis TIK

- d) Peningkatan Upaya Promosi dan Pembudayaan Hidup Sehat Era tatanan baru
- 5) Peningkatan produktifitas pemuda dan olah raga berbasis gender; fokus kebijakan pada:**
 - a) Pengendalian kelahiran dan Peningkatan Kualitas Keluarga Berencana
 - b) Peningkatan minat dan kapasitas wirausaha muda
 - c) Peningkatan layanan dan pembinaan olah raga masyarakat
- 6) Peningkatan kualitas layanan perlindungan dan Jaminan sosial serta Pemberdayaan ekonomi warga miskin dan rentan miskin; fokus kebijakan pada:**
 - a) Peningkatan layanan sosial masyarakat miskin dan rentan miskin
 - b) Perluasan perlindungan dan Jaminan sosial serta Pemberdayaan warga miskin dan rentan miskin
 - c) Peningkatan gotong royong ekonomi masyarakat
- 7) Peningkatan Kompetensi Angkatan Kerja dan Akselerasi Investasi untuk Perluasan Lapangan Kerja; fokus kebijakan pada:**
 - a) Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Angkatan Kerja
 - b) Peningkatan kerjasama ketenagakerjaan
 - c) Peningkatan akselerasi kemudahan investasi khususnya yang membuka lapangan kerja
- 8) Peningkatan kualitas keamanan dan kenyamanan hidup masyarakat; fokus kebijakan pada:**
 - a) Penguatan Kebhinekaan dan Penciptaan Ruang Dialog dan kerjasama antar Warga dan umat beragama
 - b) Peningkatan Upaya Penegakan Peraturan Daerah
 - c) Optimalisasi penanganan bencana sesuai standar
- 9) Optimalisasi Pelestarian Budaya dan Kearifan Lokal; fokus kebijakan pada:**
 - a) Penguatan Pemahaman Budaya dan kearifan lokal di Lingkungan Sekolah

- b) Pelestarian dan Promosi Seni dan Cagar Budaya

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Bappeda dan Litbang

3.2.1. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan selanjutnya mengarahkan perumusan sasaran, strategi (kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan).

Renja Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal Tahun 2023 merupakan pelaksanaan dari Perubahan Renstra Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal Tahun 2023 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Perubahan Renstra Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024.

Adapun tujuan Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal sebagaimana tertuang dalam Perubahan Renstra Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 adalah **“Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Kelitbangan”**. Dengan indikator tujuan “Indeks Perencanaan dan Kelitbangan”.

3.2.2. Sasaran

Sasaran adalah adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal yaitu:

1. Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah; dengan indikator sasaran “Indeks Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah”;
2. Meningkatnya kualitas Kelitbangan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah dengan indikator sasaran “Indeks Kelitbangan”.

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Bappeda dan Litbang Tahun 2023 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Perubahan Renstra Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 yaitu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Bappeda dan Litbang Tahun 2023-2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal 2020	Target Kinerja Tujuan/Sasaran		
						2022	2023	2024
1	Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Kelitbangan		Indeks Perencanaan dan Kelitbangan	Point	87,5	88,76	90,61	92,37
2		Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah	Point	90,58	91,68	92,76	98,08
3		Meningkatnya kualitas Kelitbangan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks Kelitbangan	Point	87,40	91,18	94,70	94,7
4		Meningkatnya Pemenuhan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah	Persen	100	100	100	100

Sumber : Bappedalitbang kabupaten Tegal, 2022

3.3. Program dan Kegiatan

Perumusan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 berpedoman pada RKPD dan Perubahan Renstra Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda dan Litbang, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program dan kegiatan dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
 - 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja.
 - a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
 - b. Sub Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
 - 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS.
 - b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD.
 - 3) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
 - a. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi.
 - 4) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor.
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
 - d. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
 - e. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan.

- f. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
 - 5) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
 - a. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
 - 6) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
 - 7) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan.
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan.
 - b. Sub Kegiatan Pemeliharaan mebel.
 - c. Sub Kegiatan Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya.
 - d. Pemeliharaan/ rehabilitas gedung kantor atau bangunan lainnya.
2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
- 1) Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Daerah.
 - a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Konsultasi Publik.
 - b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/ Kota.
 - c. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota.
 - 2) Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.
 - a. Sub Kegiatan Analisis data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.
 - b. Sub Kegiatan Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota.

- 3) Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.
 - a. Sub Kegiatan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota.
 - b. Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan berkala Pelaksanaan pembangunan Daerah.
 - c. Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah.
3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.
 - 1) Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
 - a. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD).
 - b. Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan.
 - c. Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan.
 - d. Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan.
 - e. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD).
 - f. Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia.
 - g. Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia.

- h. Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia.
- 2) Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam).
 - a. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD).
 - b. Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian.
 - c. Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian.
 - d. Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian.
 - e. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD).
 - f. Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA.
 - g. Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA.
 - h. Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA.
- 3) Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.

- a. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD).
 - b. Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur.
 - c. Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur.
 - d. Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur.
 - e. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD).
 - f. Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan.
 - g. Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah rumpun Bidang Kewilayahan.
 - h. Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan.
4. Program Penelitian dan Pengembangan.
- 1) Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan.
 - a. Sub Kegiatan Fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan Pemerintahan Umum.
 - b. Sub Kegiatan Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan.
 - c. Sub Kegiatan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan.

- 2) Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan.
 - a. Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan.
 - b. Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat.
- 3) Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan.
 - a. Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan.
 - b. Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan.
- 4) Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi.
 - a. Sub Kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan Perekrayaan di Bidang Teknologi dan Inovasi.
 - b. Sub Kegiatan Uji coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi.
 - c. Sub Kegiatan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif.
 - d. Sub Kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-hasil Kelitbangan.
 - e. Sub Kegiatan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual.

3.4. Strategi Pengarusutamaan dalam Pembangunan

Pembangunan di Kabupaten Tegal didesain melakukan pengarusutamaan (mainstreaming) dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Pengarusutamaan (mainstreaming) merupakan upaya untuk menjadikan isu-isu pengarusutamaan sebagai perspektif, sebagai cara pandang dan cara bertindak dalam melaksanakan pembangunan. Program dan kegiatan dalam pengarusutamaan (mainstreaming) tidak harus selalu eksplisit memuat nomenklatur

isu-isu pengarusutamaan (mainstreaming) namun dapat secara implisit mendukung terwujudnya isu-isu pengarusutamaan (mainstreaming). Isu-isu pengarusutamaan dalam pembangunan di Kabupaten Tegal yaitu:

a. Pengarusutamaan Gender (PUG)

Pengarusutamaan Gender (PUG) didesain sebagai perspektif untuk mewujudkan pembangunan yang responsif gender. Pembangunan yang responsif gender memberi ruang yang cukup bagi konstruksi gender laki-laki dan perempuan untuk mendapatkan akses, partisipasi, pengawasan dan manfaat dalam pembangunan. Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam program dan kegiatan ditindaklanjuti dalam bentuk Gender Analisis Pathway (GAP), Gender Budget Statement (GBS) sebagai lampiran RKA. RKA merupakan dokumen operasional Renstra dan Renja.

b. Pengarusutamaan penanggulangan masalah gizi (stunting).

Pengarusutamaan penanggulangan masalah gizi dilakukan melalui intervensi yang bersifat spesifik gizi (penanggulangan langsung kepada kelompok sasaran penanggulangan masalah gizi/stunting yaitu remaja putri, pasangan usia subur, ibu hamil, ibu melahirkan/nifas, ibu menyusui, ibu yang memiliki baduta dan balita) maupun penanggulangan sensitif gizi (program pemberdayaan ekonomi, pendidikan, sosial hingga sanitasi dasar) yang ditindaklanjuti dengan rencana aksi konvergensi stunting sebagai penjabaran Renstra dan Renja. Perangkat Daerah yang terlibat aktif dalam pengarusutamaan penanggulangan masalah gizi (stunting) terutama Dinkes (Kesehatan Ibu dan Anak, Kesehatan Lingkungan, Promosi Kesehatan); Dis Ketahanan Pangan dan Pertanian (Ketahanan Pangan dan Produksi Pangan berkelanjutan); DP3AP2KB (Keluarga Sejahtera); Disdikbud (PAUD); Disperkim (Sanitasi); DLH (Sanitasi); Dispermades (Kebijakan Desa); Bappeda dan Litbang (Aksi Konvergensi Stunting) DPUPR (infrastruktur,

sanitasi); Dinsos (kemiskinan, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, jaminan sosial); DKP (perikanan); Disperinaker (perindustrian, tenaga kerja); Disdakop UKM (Perdagangan, koperasi, UMKM).

c. Pengarusutamaan inovasi

Kebijakan, program, kegiatan atau aktifitas pembangunan yang dilaksanakan didesain dengan menerapkan dengan inovasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan. Setiap Perangkat Daerah diharapkan dapat mendesain inovasi-inovasi sesuai kewenangan, tugas pokok dan fungsi serta program dan kegiatan yang diimplementasikan. Agar inovasi yang ditetapkan memiliki daya ungkit dan dampak pembangunan yang memadai, inovasi didesain melalui pemenuhan instrumen yang sesuai dengan kriteria kelengkapan dan kematangan inovasi daerah. Kriteria kelengkapan dan kematangan inovasi didesain sebagai upaya mewujudkan peningkatan daya saing daerah.

d. Pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan merupakan implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) maupun pembangunan berkelanjutan dalam arti yang lebih luas diantaranya Pengurangan Risiko Bencana (PRB), kependudukan, lingkungan hidup, pendidikan, kesehatan hingga kesejahteraan sosial. Perspektif pembangunan berkelanjutan mewarnai perencanaan program, kegiatan dan aktifitas Perangkat Daerah yang diturunkan ke dalam Renstra dan Renja.

e. Pengarusutamaan keberpihakan kepada kelompok inklusi

Kelompok inklusi merupakan anggota masyarakat yang memiliki karakteristik khas dan seringkali berada pada posisi yang marjinal dalam pembangunan. Kelompok inklusi ini antara lain difabel, lansia, pemuda, masyarakat miskin/tertinggal, pemuda, perempuan dan anak serta kelompok inklusi lain yang masih marjinal. Dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program, kegiatan dan aktifitas Perangkat

Daerah didesain dengan perspektif memuliakan kelompok inklusi dalam membuka ruang akses, peran, kontrol dan manfaat dalam pembangunan.

f. Pengarusutamaan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) menjadi perspektif dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dalam kebijakan, rencana, program urusan-urusan wajib pelayanan dasar meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, permukiman rakyat, sosial, serta ketentraman dan ketertiban umum. Integrasi SPM dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah diterapkan melalui penetapan indikator kinerja SPM sebagai indikator kinerja *outcome* program pembangunan. Komitmen pengarusutamaan SPM diimplementasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan di dalam Renstra dan Renja.

g. Pengarusutamaan Mitigasi Risiko

Mitigasi risiko pembangunan merupakan salah satu sistem agar reformasi birokrasi dapat berjalan dengan baik. Mitigasi risiko pembangunan merupakan tugas melekat pada masing-masing Perangkat Daerah. Dalam melakukan mitigasi risiko dilakukan identifikasi potensi risiko dalam Register Risiko. Register Risiko merupakan identifikasi potensi risiko yang paling mungkin terjadi atau kebijakan rencana program yang memiliki risiko paling tinggi. Dari Register Risiko disusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP). RTP disusun dengan memperhatikan Lingkungan pengendalian; Penilaian risiko; Kegiatan pengendalian; Informasi dan komunikasi serta Pemantauan pengendalian intern.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Perencanaan program dan kegiatan Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal Tahun 2023, mengacu pada arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun 2023 dan disesuaikan dengan jumlah dana / anggaran yang sudah ditetapkan pagu indikatifnya oleh Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal. Program-program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 berjumlah 4 (empat) program, terdiri dari 17 (tujuh belas) kegiatan dan 63 (enam puluh tiga) sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp 7.833.760.000,- (Tujuh milyar delapan ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah). Rumusan Rencana program dan kegiatan beserta pagu anggaran untuk tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 Kabupaten Tegal

No.	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan dan Program/Kegiatan/Sub Keg					Indikator Capaian Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)			Prakiraan Tahun 2024		Asal Usulan
							Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD 2023	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2					3	4	5	6	7	8	9
5						UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
5	1					PERENCANAAN			6.834.760.000		7.284.628.000	
5	1	1				Program Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		100	4.794.760.000	100	4.909.628.000	
5	01	001	02.01			1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Tersusunnya dokumen perencanaan	Kab Tegal		99.500.000		99.500.000
5	1	1	02.01	1		1) Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Renja		1 Dok	95.500.000	1 Dok	95.500.000
5	1	1	02.01	6		2) Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan kinerja (LKJIP, PMPRB, SAKIP)		3 Dok	4.000.000	3 Dok	4.000.000
5	01	001	02.02			2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Kebutuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab Tegal	100	3.186.362.000	100	3.301.280.000
5	1	1	02.02	1		1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	Gaji dan Tunjangan ASN		12 bln	3.085.082.000	12 bln	3.200.000.000
5	1	1	02.02	3		2) Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Laporan Administrasi keuangan		5 Dok	101.280.000	5 Dok	101.280.000
							Jumlah honor pengelola keuangan yang dibayarkan		12 bln		12 bln	
5	01	001	02.05			3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Kebutuhan Adm. Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab Tegal	100	58.000.000	100	58.000.000

No.					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan/Sub Keg	Indikator Capaian Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan Program (Output)	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)			Prakiraan Tahun 2024		Asal Usulan
							Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD 2023	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9
5	1	1	02.05	9	1) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Diklat Bintek yang diikuti		12 bln	58.000.000	12 bln	58.000.000	
5	01	001	02.06		4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Kebutuhan Adm. Umum Perangkat Daerah	Kab Tegal	100	282.329.000	100	282.279.000	
5	1	1	02.06	1	1) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		50 buah	20.000.000	50 buah	20.000.000	
5	1	1	02.06	2	2) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor		32 item	80.609.000	32 item	80.609.000	
						Jumlah Jenis Peralatan kebersihan dan bahan pembersih		23 item		23 item		
5	1	1	02.06	4	3) Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah pegawai, tamu, dan peserta rapat mendapatkan jamuan		12 bulan	66.500.000	12 bulan	66.500.000	
5	1	1	02.06	5	4) penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan		5 item	34.550.000	5 item	34.500.000	
5	1	1	02.06	6	5) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan		12 bulan	12.000.000	12 bulan	12.000.000	
5	1	1	02.06	9	6) Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang terpenuhi		12 bulan	68.670.000	12 bulan	68.670.000	
5	01	001	02.07		5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Kab Tegal	100	263.700.000	100	263.700.000	
5	01	001	02.07	6	1) Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	drone		1 Unit	263.700.000	1 unit	263.700.000	
						Jumlah Laptop		2 unit		5 unit		
						Jumlah Printer		2 unit		5 unit		
						Scanner		1 unit		-		

No.					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan/Sub Keg	Indikator Capaian Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan Program (Output)	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)			Prakiraan Tahun 2024		Asal Usulan
							Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD 2023	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9
						Penyaring udara		2 unit		-		
						Speaker aktif		1 unit		-		
5	01	001	02.08		6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintahan	Persentase ketersediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan	Kab Tegal	100	203.548.000	100	203.548.000	
5	1	1	02.08	1	1) Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah perangko dan materai		350 buah	2.000.000	350 buah	2.000.000	
5	1	1	02.08	2	2) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah komunikasi, air dan listrik yang terpenuhi		12 bulan	188.000.000	12 bulan	188.000.000	
5	1	1	02.08	4	3) Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah bpjs kesehatan thl yang terbayarkan		12 bulan	13.548.000	12 bulan	13.548.000	
5	01	001	02.09		7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan	Terlaksananya Pemeliharaan barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan	Kab Tegal	100	701.321.000	100	701.321.000	
5	1	1	02.09	1	1) Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	servis kendaraan		1 tahun	247.681.000	1 tahun	247.681.000	
						suku cadang		59 buah		59 buah		
						BBM		12.614 liter		12.614 liter		
						STNK		1 tahun		1 tahun		
5	1	1	02.09	5	2) Pemeliharaan mebel	Jumlah pemeliharaan mebeleur		1.785 m2	10.000.000	1.785 m2	10.000.000	
5	1	1	02.09	6	3) Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan kantor dan mesin lainnya yang terpelihara		99 buah	89.280.000	99 buah	89.280.000	
5	1	1	02.09	9	4) Pemeliharaan/ rehabilitas gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah pemeliharaan gedung kantor atau bangunan lainnya		12 bulan	354.360.000	12 bulan	354.360.000	
5	1	2			Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan disusun sesuai tahapan dan Kebijakan anggaran		100	750.000.000	100	935.000.000	

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan/Subi Keg				Indikator Capaian Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan Program (Output)	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)			Prakiraan Tahun 2024		Asal Usulan
						Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD 2023	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2				3	4	5	6	7	8	9
					Persentase hasil rekomendasi pengendalian yang ditindaklanjuti		80		85		
5	01	002	02.01		1. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Daerah	Persentase tahapan penyusunan dokumen perencanaan yang dilaksanakan	Kab Tegal	100	480.000.000	100	555.000.000
5	1	2	02.01	3	1) Pelaksanaan Konsultasi Publik	Terselenggaranya Konsultasi Publik		1 kali	50.000.000	1 Berita Acara	55.000.000
5	1	2	02.01	5	2) Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Musrenbang Kabupaten		1 kali	150.000.000	1 Berita Acara	200.000.000
5	1	2	02.01	7	3) Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen RPJPD, RPJMD Teknokratik, RKPD, RKPD Perubahan		2 Dok	280.000.000	2 Dok	300.000.000
5	01	002	02.02		2. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketersediaan data dan informasi yang dimanfaatkan dalam penyusunan dokumen perencanaan	Kab Tegal	99	75.000.000	99	110.000.000
5	01	002	02.02	1	1) Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah data dan informasi untuk penyusunan perencanaan pembangunan daerah		1 dok	50.000.000	10 Masukan	50.000.000
5	01	002	02.02	3	2) Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Profil Pembangunan Daerah		1 dok	25.000.000	1 buku	60.000.000
5	01	002	02.03		3. Pengendalian, Evaluasi dan pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase rekomendasi yang dihasilkan atas pengendalian evaluasi dan pelaporan	Kab Tegal	100	195.000.000	100	270.000.000

No.					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan/Sub Keg	Indikator Capaian Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)			Prakiraan Tahun 2024		Asal Usulan
							Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD 2023	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9
5	01	002	02.03	1	1) Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan evaluasi hasil RKPD		1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	80.000.000	
						LKPJ dan AMJ LKPJ		2 dok		1 dok		
						Laporan evaluasi RPJMD				1 laporan		
						Laporan evaluasi RPJPD				1 laporan		
5	01	002	02.03	3	2) Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi dan pelaporan pelaksanaan pengendalian pelaksanaan kerjasama daerah		1 Laporan	20.000.000		40.000.000	
5	01	002	02.03	2	3) Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Rakor TEPR		2 kali	125.000.000		150.000.000	
						Laporan DAK		1 Laporan				
						Laporan Banprov		1 Laporan				
5	1	3			Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah rumpun Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		91,77	1.290.000.000	91,98	1.440.000.000	
						Tingkat Keselarasan Dokumen Perencanaan rumpun Bidang Perekonomian dan SDA		93,17		93,23		
						Tingkat Keselarasan Dokumen Perencanaan rumpun Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		93,45		93,59		
5	01	003	02.01		1. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah rumpun Bidang Pemerintahan yang selaras	Kab Tegal	92,19	500.000.000	92,19	500.000.000	

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan/Sub Keg	Indikator Capaian Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan Program (Output)	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)			Prakiraan Tahun 2024		Asal Usulan				
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD 2023	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif					
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
		<i>Percentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah rumpun Bidang Pembangunan Manusia yang selaras</i>		91,88		92,19						
		<i>Percentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah rumpun Bidang Kesejahteraan Masyarakat yang selaras</i>		91,25		91,56						
5	01	003	02.01	1	1) Koordinasi penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	jumlah dokumen PD bid pemerintahan yang mempedomani kebijakan perencanaan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		60 dok koordinasi	30.000.000	60 dok koordinasi	30.000.000	
5	01	003	02.01	2	2) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	jumlah dokumen PD bidang pemerintahan yg disusun sesuai tahapan (Renja dan Renstra)		60 dok koordinasi	30.000.000	60 dok koordinasi	30.000.000	
5	01	003	02.01	3	3) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan/hasil dokumen perencanaan PD bid pemerintahan		120 dok monev	30.000.000	120 dok monev	30.000.000	
5	01	003	02.01	4	4) Koordinasi Pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan	jumlah dokumen hasil sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan rumpun pemerintahan		1 dok sinergitas	30.000.000	1 dok sinergitas	30.000.000	

No.					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan/Sub Keg	Indikator Capaian Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan Program (Output)	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)			Prakiraan Tahun 2024		Asal Usulan
							Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD 2023	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9
5	01	003	02.01	5	5) Koordinasi Penyusunan Dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	jumlah dokumen PD bidang PM dan Kesmas yg disusun sesuai tahapan (Renja dan Renstra)		16 dok koordinasi	60.000.000	16 dok koordinasi	60.000.000	
5	01	003	02.01	6	6) Asistensi Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pembangunan manusia	jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan/hasil dokumen perencanaan PD bid PM dan Kesmas		16 dok asistensi	60.000.000	16 dok asistensi	60.000.000	
5	01	003	02.01	7	7) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan/hasil dokumen perencanaan PD bid PM & Kesmas		32 dok monev	60.000.000	32 dok monev	60.000.000	
5	01	003	02.01	8	8) Koordinasi Pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia	jumlah dokumen hasil sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan rumpun PM & Kesmas		3 dok sinergitas	200.000.000	3 dok sinergitas	200.000.000	
5	01	003	02.02		2. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA	Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah rumpun Bidang Perekonomian yang selaras	Kab Tegal	92,45	340.000.000	92,5	340.000.000	
						Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah rumpun Bidang SDA yang selaras		93,89		93,97		

No.					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan/Sub Keg	Indikator Capaian Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan Program (Output)	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)			Prakiraan Tahun 2024		Asal Usulan
							Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD 2023	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9
5	01	003	02.02	1	1) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	jumlah dokumen PD bid perekonomian yang mempedomani kebijakan perencanaan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)		8 dok	60.000.000	8 dok	60.000.000	
5	01	003	02.02	2	2) Asistensi Penyusunan Dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang perekonomian	jumlah dokumen PD bidang perekonomian yg disusun sesuai tahapan (Renja dan Renstra)		8 dok	30.000.000	8 dok	30.000.000	
5	01	003	02.02	3	3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang perekonomian	jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan/hasil dokumen perencanaan PD bid perekonomian		16 dok	30.000.000	16 dok	30.000.000	
5	01	003	02.02	4	4) Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian	jumlah dokumen hasil sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan rumpun perekonomian		2 dok	60.000.000	2 dok	60.000.000	
5	01	003	02.02	5	5) Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	jumlah dokumen PD bid SDA yang mempedomani kebijakan perencanaan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)		4 dok	50.000.000	4 dok	50.000.000	
5	01	003	02.02	6	6) Asistensi Penyusunan Dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang SDA	jumlah dokumen PD bidang SDA yg disusun sesuai tahapan (Renja dan Renstra)		4 dok	30.000.000	4 dok	30.000.000	
5	01	003	02.02	7	7) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang SDA	jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan/hasil dokumen perencanaan PD bid SDA		8 dok	30.000.000	8 dok	30.000.000	

No.					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan/Sub Keg	Indikator Capaian Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan Program (Output)	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)			Prakiraan Tahun 2024		Asal Usulan
							Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD 2023	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9
5	01	003	02.02	8	8) Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang SDA	jumlah dokumen hasil sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan rumpun SDA		2 dok	50.000.000	2 dok	50.000.000	
5	01	003	02.03		3. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah rumpun Bidang Infrastruktur yang selaras	Kab Tegal	92,48	450.000.000	92,6	600.000.000	
						Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah rumpun Bidang Kewilayahan yang selaras		94,42		94,58		
5	01	003	02.03	1	1) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	jumlah dokumen PD bid infrastruktur yang mempedomani kebijakan perencanaan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		4 dok	40.000.000	4 dok	40.000.000	
5	01	003	02.03	2	2) Asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang infrastruktur	jumlah dokumen PD bidang infrastruktur yg disusun sesuai tahapan (Renja dan Renstra)		4 dok	40.000.000	4 dok	70.000.000	
5	01	003	02.03	3	3) Pelaksanaan monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan/hasil dokumen perencanaan PD bid infrastruktur		8 dok	50.000.000	8 dok	75.000.000	
5	01	003	02.03	4	4) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur	jumlah dokumen hasil sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan rumpun infrastruktur		2 dok	100.000.000	2 dok	130.000.000	

No.					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan/Sub Keg	Indikator Capaian Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)			Prakiraan Tahun 2024		Asal Usulan
							Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD 2023	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9
5	01	003	02.03	5	5) Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	jumlah dokumen PD bid kewilayahan yang mempedomani kebijakan perencanaan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		4 dok	40.000.000	4 dok	70.000.000	
5	01	003	02.03	6	6) Asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang kewilayahan	jumlah dokumen PD bidang kewilayahan yg disusun sesuai tahapan (Renja dan Renstra)		4 dok	40.000.000	4 dok	40.000.000	
5	01	003	02.03	7	7) Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah rumpun bidang kewilayahan	jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan/hasil dokumen perencanaan PD bid kewilayahan		8 dok	50.000.000	8 dok	75.000.000	
5	01	003	02.03	8	8) Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan	jumlah dokumen hasil sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan rumpun kewilayahan		2 dok	90.000.000	2 dok	100.000.000	
5	5				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				999.000.000		1.055.150.000	
5	5	2			Program Penelitian dan Pengembangan	Persentase Dukungan Produk Kelitbang dalam Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.		73,44	999.000.000	87,5	1.055.150.000	
						Skor Inovasi		5.000		5.500		
5	05	002	02.01		1. Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah rekomendasi litbang Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan mendukung Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.	Kab Tegal	73,44	105.000.000	87,5	145.000.000	

No.					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan/Sub Keg	Indikator Capaian Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan Program (Output)	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)			Prakiraan Tahun 2024		Asal Usulan
							Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD 2023	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9
5	5	2	02.01	2	1) Fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan Pemerintahan umum	Jumlah Rekomendasi Kajian Mandiri mendukung Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.		1 dok rekomendasi	50.000.000	1 dok rekomendasi	65.000.000	
5	5	2	02.01	12	2) Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Laporan Forum Data Kelitbangan		1 laporan	35.000.000	1 laporan	50.000.000	
5	5	2	02.01	14	3) Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Laporan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD).		1 laporan	20.000.000	1 laporan	30.000.000	
5	05	002	02.02		2. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah Rekomendasi Litbang Bidang Sosial dan Kependudukan mendukung Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.	Kab Tegal	91,89	149.000.000	91,89	160.000.000	
5	5	2	02.02	3	1) Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Mahasiswa Berprestasi dan insentif penelitian mahasiswa/ masyarakat di wilayah Kabupaten Tegal		7 Mahasiswa Berprestasi dan 7 Dokumen Rekomendasi	119.000.000	7 Mahasiswa Berprestasi dan 7 Dokumen Rekomendasi	120.000.000	
5	5	2	02.02	10	2) Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Rekomendasi Litbang tematik Partisipasi Masyarakat mendukung Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.		3 penelitian masyarakat	30.000.000	3 penelitian masyarakat	40.000.000	

No.					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan/Sub Keg	Indikator Capaian Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)			Prakiraan Tahun 2024		Asal Usulan
							Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD 2023	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9
5	05	002	02.03		3. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase Rekomendasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang terpenuhi	Kab Tegal	91,89	130.000.000		130.000.000	
5	5	2	02.03	4	1) Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Rekomendasi Litbang Tematik Bidang Pertanian, Perkebunan dan Pangan mendukung Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.		1 Penelitian tematik	30.000.000	1 Penelitian tematik	30.000.000	
5	5	2	02.03	12	2) Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah Rekomendasi Litbang Tematik Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan mendukung Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.		1 Kajian Kawasan Perdesaan	100.000.000	1 Kajian Kawasan Perdesaan	100.000.000	
5	05	002	02.04		4. Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Jumlah produk inovasi yang dikembangkan.	Kab Tegal	87,4	615.000.000	87,4	620.150.000	
5	5	2	02.04	1	1) Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Produk Inovasi yang dihasilkan dalam kontes KreNOVA		1 Kontes KreNOVA	242.150.000	1 Kontes KreNOVA	242.150.000	
5	5	2	02.04	2	2) Uji coba dan Penerapan rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Komunitas Inovasi Masyarakat yang berkembang dan mandiri.		2 komunitas berkembang dan mandiri	141.850.000	2 komunitas berkembang dan mandiri	141.850.000	
						Jumlah Desa yang Mendapat Pendampingan Sistem Inovasi Daerah.		1 desa, 1 inovasi		1 desa, 1 inovasi		
						Jumlah Fasilitas dan Pemanfaatan Hasil Inovasi Lembaga/ Perguruan Tinggi.		5 Inovasi PTN/PTS		5 Inovasi PTN/PTS		

No.					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan/Sub Keg	Indikator Capaian Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan Program (Output)	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)			Prakiraan Tahun 2024		Asal Usulan
							Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD 2023	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9
5	5	2	02.04	3	3) Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat Inovatif	Jumlah OPD yang mendapat Fasilitas Penyelenggaraan Inovasi (IGA, KIPP, PUJA INDAH)		48 OPD	95.950.000	48 OPD	95.950.000	
5	5	2	02.04	4	4) Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-hasil Kelitbangan	website bappeda dan litbang yang informatif dan update		1 website	84.850.000	1 website	90.000.000	
						Jumlah majalah yang diterbitkan		500 eksemplar		500 eksemplar		
5	5	2	02.04	5	5) Fasilitas Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Fasilitas HAKI Kreator dan Inovator Kabupaten Tegal		2 produk	50.200.000	2 produk	50.200.000	
					TOTAL PAGU INDIKATIF				7.833.760.000		8.339.778.000	

Sumber : Bappedalitbang kabupaten Tegal, 2022

BAB V

P E N U T U P

Rancangan Renja Bappedalitbang Kabupaten Tegal Tahun 2023 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Rancangan Renja yang kemudian disempurnakan hingga dokumen Renja ditetapkan ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Bappedalitbang Kabupaten Tegal di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada keseluruhan tahapan penyusunan Rancangan Renja hingga Penetapan Renja Bappedalitbang Kabupaten Tegal Tahun 2023 antara lain :

1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tegal;
2. Berpedoman pada indikator kinerja dan kelompok sasaran, rencana program, kegiatan / sub kegiatan, serta pendanaan indikatif pada Perubahan Renstra untuk tahun 2023.
3. Berpedoman pada RKPD Kabuapten Tegal Tahun 2023, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan;

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Renja Bappedalitbang Kabupaten Tegal Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Renja Bappedalitbang ini akan menjadi Program dan kegiatan/sub kegiatan, lokasi, dana indikatif Renja menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Bappedalitbang Kabupaten Tegal Tahun 2023;

c. Rencana Tindak Lanjut

Untuk rencana tindak lanjut dari penyusunan dokumen Rancangan Akhir Renja Bappedalitbang Kabupaten Tegal Tahun 2023 adalah akan

dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Renja Bappedalitbang Kabupaten Tegal Tahun 2023 untuk setiap triwulannya.

Selanjutnya program dan kegiatan pada Renja Bappedalitbang Kabupaten Tegal Tahun 2023 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Bappedalitbang Kabupaten Tegal, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan stakeholder pembangunan di Kabupaten Tegal.

Dengan disusunnya Rancangan Renja Bappedalitbang Kabupaten Tegal Tahun 2023 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan / pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Bappedalitbang Kabupaten Tegal pada Tahun Anggaran 2023.

Slawi,

2022

Kepala Bappedalitbang Kabupaten Tegal

MUHAMMAD FARIED WAJDY, S.Sos,M.Si

Lampiran : Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Tegal
 Nomor : 050 / 23 / / 2022
 Tanggal : Mei 2022

A. Tabel Daftar Inventarisasi Masalah (DIM)

No	Daftar Inventarisasi Masalah	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perlu dioptimalkan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk menjamin pelaksanaan operasional kegiatan PD	1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja
3	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk menjamin pelaksanaan operasional kegiatan PD	1) Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
4	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk menjamin pelaksanaan operasional kegiatan PD	2) Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD
5	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk menjamin pelaksanaan operasional kegiatan PD	2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
6	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk menjamin pelaksanaan operasional kegiatan PD	1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS
7	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk menjamin pelaksanaan operasional kegiatan PD	2) Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD
8	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk menjamin pelaksanaan operasional kegiatan PD	3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk menjamin pelaksanaan operasional kegiatan PD	1) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi
10	Administrasi Umum Perangkat Daerah perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk menjamin pelaksanaan operasional kegiatan PD	4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
11	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk menjamin pelaksanaan operasional kegiatan PD	1) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
12	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk menjamin pelaksanaan operasional kegiatan PD	2) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
13	Penyediaan bahan logistik kantor perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk menjamin pelaksanaan operasional kegiatan PD	3) Penyediaan bahan logistik kantor

No	Daftar Inventarisasi Masalah	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
14	<i>penyediaan barang cetakan dan penggandaan</i> perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk menjamin pelaksanaan operasional kegiatan PD	4) <i>penyediaan barang cetakan dan penggandaan</i>
15	<i>Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</i> perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk menjamin pelaksanaan operasional kegiatan PD	5) <i>Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</i>
16	<i>Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD</i> perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk menjamin pelaksanaan operasional kegiatan PD	6) <i>Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD</i>
17	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk menjamin pelaksanaan operasional kegiatan PD</i>	5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
18	<i>Pengadaan peralatan dan mesin lainnya</i> perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk menjamin pelaksanaan operasional kegiatan PD	1) <i>Pengadaan peralatan dan mesin lainnya</i>
19	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintahan perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk menjamin pelaksanaan operasional kegiatan PD</i>	6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintahan
20	<i>Penyediaan jasa surat menyurat</i> perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk menjamin pelaksanaan operasional kegiatan PD	1) <i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>
21	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i> perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk menjamin pelaksanaan operasional kegiatan PD	2) <i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>
22	<i>Penyediaan jasa pelayanan umum kantor</i> perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk menjamin pelaksanaan operasional kegiatan PD	3) <i>Penyediaan jasa pelayanan umum kantor</i>
23	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pamarintahan perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk menjamin pelaksanaan operasional kegiatan PD</i>	7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pamarintahan
24	<i>Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan</i> perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk menjamin pelaksanaan operasional kegiatan PD	1) <i>Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan</i>
25	<i>Pemeliharaan mebel</i> perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk menjamin pelaksanaan operasional kegiatan PD	2) <i>Pemeliharaan mebel</i>
26	<i>Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya</i> perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk menjamin pelaksanaan operasional kegiatan PD	3) <i>Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya</i>
27	<i>Pemeliharaan/ rehabilitas gedung kantor atau bangunan lainnya</i> perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk menjamin pelaksanaan operasional kegiatan PD	4) <i>Pemeliharaan/ rehabilitas gedung kantor atau bangunan lainnya</i>
28	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah perlu ditingkatkan	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
29	<i>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Daerah perlu dioptimal</i>	1. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Daerah
30	<i>Pelaksanaan Konsultasi Publik perlu dioptimalkan</i>	1) <i>Pelaksanaan Konsultasi Publik</i>
31	<i>Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota perlu dioptimalkan</i>	2) <i>Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota</i>
32	<i>Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota perlu dioptimalkan</i>	3) <i>Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota</i>

No	Daftar Inventarisasi Masalah	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
33	Masih rendahnya Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	2. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
34	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah masih kurang	1) Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
35	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota masih kurang	2) Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
36	Pengendalian, Evaluasi dan pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah perlu ditingkatkan	3. Pengendalian, Evaluasi dan pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
37	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota perlu ditingkatkan	1) Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota
38	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah perlu dioptimalkan	2) Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
39	Masih kurangnya Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	3) Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah
40	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah perlu ditingkatkan	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
41	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia perlu ditingkatkan	1. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
42	Masih kurangnya Koordinasi penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1) Koordinasi penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
43	Masih kurangnya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	2) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
44	Masih kurangnya Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	3) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
45	Koordinasi Pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan perlu dioptimalkan	4) Koordinasi Pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan
46	Masih kurangnya Koordinasi Penyusunan Dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	5) Koordinasi Penyusunan Dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
47	Masih kurangnya Asistensi Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pembangunan manusia	6) Asistensi Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pembangunan manusia
48	Masih kurangnya Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	7) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
49	Koordinasi Pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia perlu ditingkatkan	8) Koordinasi Pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia
50	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA perlu dioptimal	2. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA
51	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) perlu dioptimal	1) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
52	Masih kurangnya Asistensi Penyusunan Dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang perekonomian	2) Asistensi Penyusunan Dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang perekonomian

No	Daftar Inventarisasi Masalah	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
53	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang perekonomian perlu dioptimalkan	3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang perekonomian
54	Masih kurangnya Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian	4) Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian
55	Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) perlu dioptimal	5) Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
56	Masih kurangnya Asistensi Penyusunan Dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang SDA	6) Asistensi Penyusunan Dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang SDA
57	Masih kurangnya Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang SDA	7) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang SDA
58	Masih kurangnya Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang SDA	8) Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang SDA
59	<i>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah perlu dioptimal</i>	<i>3. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah</i>
60	Masih kurangnya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
61	Masih kurangnya Asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang infrastruktur	2) Asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang infrastruktur
62	Pelaksanaan monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur perlu dioptimal	3) Pelaksanaan monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
63	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur perlu ditingkatkan	4) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur
64	Masih kurangnya Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	5) Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
65	Masih kurangnya Asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang kewilayahan	6) Asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang kewilayahan
66	Masih kurangnya Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah rumpun bidang kewilayahan	7) Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah rumpun bidang kewilayahan
67	Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan perlu dioptimal	8) Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan
68		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
69	Program Penelitian dan Pengembangan perlu ditingkatkan.	Program Penelitian dan Pengembangan
70	<i>Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan perlu dioptimal</i>	<i>1. Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan</i>
71	Masih kurangnya Fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan Pemerintahan umum	1) Fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan Pemerintahan umum
72	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan perlu ditingkatkan	2) Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan

No	Daftar Inventarisasi Masalah	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
73	Masih kurangnya Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	3) Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan
74	Masih kurangnya Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	2. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
75	Masih kurangnya Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	1) Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan
76	Masih kurangnya Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	2) Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat
77	Masih kurangnya Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	3. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
78	Masih kurangnya Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	1) Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan
79	Masih kurangnya Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	2) Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan
80	Pengembangan Inovasi dan Teknologi perlu ditingkatkan	4. Pengembangan Inovasi dan Teknologi
81	Masih kurangnya Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1) Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi
82	Masih kurangnya Uji coba dan Penerapan rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	2) Uji coba dan Penerapan rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi
83	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat Inovatif perlu dioptimalkan	3) Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat Inovatif
84	Masih kurangnya Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-hasil Kelitbangan	4) Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-hasil Kelitbangan
85	Masih kurangnya Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	5) Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual

KEPALA BAPPEDALITBANG KABUPATEN TEGAL

M. FARIED WAJDY , S.Sos, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19730801 1999803 1 003